

PANDUAN PENYUSUNAN PROFIL SOSIAL EKONOMI TEKNIK DAN KELEMBAGAAN (PSETK)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Taman Makam Pahlawan No 20, Kalibata Jakarta Selatan 12750



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Juli 2018

Nomor : 660/3108/Bangda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyampaian Panduan

Yth. Daftar terlampir
di-
Tempat

Dalam rangka pengelolaan irigasi partisipatif untuk mendukung program ketahanan pangan, terlampir disampaikan panduan pelaksanaan kegiatan / program dimaksud yang terdiri dari:

1. Panduan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK)
2. Panduan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR)
3. Panduan Pemberdayaan Masyarakat Petani Daerah Irigasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Ir. Dian Indrajati, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Menteri Pertanian
4. Asian Development Bank

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor : 660/3108/Bangda

Tanggal : 5 Juli 2018

Kepala Daerah di:

1. Provinsi Aceh
 - Kabupaten Aceh Timur,
 - Kabupaten Aceh Besar
 - Kabupaten Aceh Utara
 - Kabupaten Bireuen
2. Provinsi Sumatera Utara
 - Kabupaten Asahan
 - Kabupaten Simalungun
 - Kabupaten Humbang Hasundutan
 - Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Provinsi Sumatera Barat
 - Kabupaten Pasaman
 - Kabupaten Pasaman Barat
 - Kabupaten Pesisir Selatan
 - Kabupaten Sijunjung
 - Kabupaten Limapuluh Koto
4. Provinsi Sumatera Selatan
 - Kabupaten Musi Rawas
 - Kabupaten Empat Lawang
 - Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 - Kabupaten Musi Banyuasin
 - Kabupaten Banyuasin
 - Kabupaten Muara Enim
 - Kabupaten Lahat
5. Provinsi Lampung
 - Kabupaten Pesawaran
 - Kabupaten Tulangbawang
 - Kabupaten Tanggamus
 - Kabupaten Mesuji
 - Kabupaten Lampung Tengah
6. Provinsi Banten
 - Kabupaten Pandeglang
 - Kabupaten Serang
7. Provinsi Jawa Barat
 - Kabupaten Ciamis
 - Kabupaten Sukabumi
 - Kabupaten Garut
 - Kabupaten Indramayu
 - Kabupaten Kuningan
 - Kabupaten Majalengka
 - Kabupaten Sumedang
8. Provinsi Jawa Tengah
 - Kabupaten Cilacap
 - Kabupaten Banyumas
 - Kabupaten Pekalongan
 - Kabupaten Banjarnegara
 - Kabupaten Kebumen

- Kabupaten Purworejo
- Kabupaten Pati
- 9. Provinsi Jawa Timur
 - Kabupaten Ngawi
 - Kabupaten Tuban
 - Kabupaten Bojonegoro
 - Kabupaten Madiun
 - Kabupaten Kediri
 - Kabupaten Lamongan
 - Kabupaten Jombang
 - Kabupaten Lumajang
 - Kabupaten Jember
- 10. Provinsi Kalimantan Barat
 - Kabupaten Sambas
 - Kabupaten Kubu Raya
 - Kabupaten Kayong Utara
 - Kabupaten Ketapang
- 11. Provinsi Kalimantan Selatan
 - Kabupaten Barito Kuala
 - Kabupaten Tapin
 - Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - Kabupaten Tanah Bumbu
- 12. Provinsi Sulawesi Utara
 - Kabupaten Minahasa Selatan
 - Kabupaten Bolaang Mongondow
- 13. Provinsi Sulawesi Tengah
 - Kabupaten Toli-Toli
 - Kabupaten Poso
 - Kabupaten Banggai
- 14. Provinsi Sulawesi Selatan
 - Kabupaten Bone
 - Kabupaten Soppeng
 - Kabupaten Wajo
 - Kabupaten Pinrang
 - Kabupaten Sidenreng Rappang
- 15. Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Kabupaten Lombok Tengah
 - Kabupaten Lombok Timur
 - Kabupaten Bima
 - Kabupaten Dompu
- 16. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - Kabupaten Manggarai Barat
 - Kabupaten Manggarai Timur

KATA PENGANTAR

Reformasi kebijakan sumber daya air dan irigasi-pertanian merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan landasan partisipatif. Kebijakan ini dikemas dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSI) yang merupakan dasar operasional kegiatan yang bertumpu pada pemberdayaan baik di tingkat aparat pemerintah maupun masyarakat petani pemakai air yang tergabung dalam kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), dan Poktan/Gapoktan.

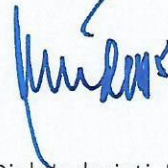
Program kegiatan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif perlu didasarkan pada proses perencanaan yang tepat. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat diselenggarakan melalui penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan (PSETK). PSETK bertujuan untuk melihat dan memotret kondisi potensi dan persoalan yang ada di suatu wilayah Daerah Irigasi, serta bagaimana rencana penanganannya berdasarkan kemampuan wilayah tersebut. Mengingat tingkat kepentingan kegiatan tersebut, maka diperlukan penjelasan dan acuan kegiatan di daerah agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, melalui panduan penyusunan PSETK untuk pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan / Gapoktan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu proses penyesuaian panduan ini, juga kepada seluruh pemangku kepentingan atas kerjasama dan koordinasinya yang telah dilaksanakan secara harmonis.

Jakarta, 05 Juli 2018

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

Plt. DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



Ir. Diah Indrajati, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Maksud dan Tujuan	1
I.3 Sasaran	2
I.4 Ruang Lingkup.....	2
I.5 Pengertian Umum.....	2
BAB II PRINSIP-PRINSIP PSETK	6
BAB III PENDEKATAN DAN METODE PENYUSUNAN PSETK.....	7
III.1 Pendekatan Penyusunan PSETK.....	7
III.2 Metode Penyusunan PSETK	7
III.3 Prinsip Dasar Metode PPKDI	7
III.4 Teknik Penerapan PPKDI	8
BAB IV TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN PSETK.....	10
IV.1 Bagan Alir Tahapan Kegiatan Penyusunan	10
IV.2 Tahap Persiapan	13
IV.2.1. Sosialisasi PSETK.....	13
IV.2.2. Pelatihan PSETK.....	14
IV.2.3. Rapat Pertemuan Awal	15
IV.2.4. Penerbitan SK Tim Penyusun PSETK.....	17
IV.2.5. Rapat Pertemuan Sosialisasi di Tingkat Daerah Irigasi.....	17
IV.3 Tahap Pelaksanaan	18
IV.3.1. Rapat Persiapan Pelaksanaan	18
IV.3.2. Penelusuran Jaringan.....	26
IV.3.3. Penggalan Gagasan	26
IV.4 Tahap Penyusunan Laporan.....	27
IV.4.1. Verifikasi Data PSETK	27
IV.4.2. Konsolidasi Hasil PSETK.....	27
IV.4.3. Penyusunan Laporan PSETK	27
IV.4.4. Finalisasi Laporan PSETK.....	29
IV.5 Tahap Akhir.....	29
IV.5.1. Legalisasi Dokumen PSETK.....	29
IV.5.2. Penyampaian Laporan PSETK	29
BAB V EVALUASI DAN PEMBARUAN DOKUMEN PSETK.....	31
V.1 Evaluasi Pelaksanaan.....	31
V.1.1. Tolok Ukur	31
V.1.2. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi.....	31
V.1.3. Monitoring dan Evaluasi	31
V.2 Pembaharuan PSETK	32
BAB VI PEMBIAYAAN KEGIATAN PSETK.....	33
VI.1 Sumber Pembiayaan	33
VI.2 Kebutuhan Pembiayaan	33
BAB VII PENUTUP	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bagan Alir Tahapan Kegiatan Penyusunan PSETK.....	10
Tabel 2 Indikator Kuantitatif Kondisi Bangunan Dan Saluran.....	19
Tabel 3 Indikator Deskriptif Kondisi Bangunan Sipil Dan Lining.....	19
Tabel 4 Indikator Deskriptif Kondisi Pintu Air.....	20
Tabel 5 Indikator Kondisi Tanggul Saluran.....	20
Tabel 6 Indikator Fungsi.....	21
Tabel 7 Indikator Pelayanan.....	21
Tabel 8 Kebutuhan Data Dan Sumber Data Untuk Kepentingan Organisasi P3A/GP3A/IP3A.....	22
Tabel 9 Kebutuhan Data Dan Sumber Data Untuk Kepentingan OPD, Komisi Irigasi Dan Pihak Lainnya.....	23
Tabel 10 Contoh Kebutuhan Waktu Pelsaksanaan PSETK.....	24
Tabel 11 Pembagian Kelompok Tim Pelaksana PSETK.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.....	1
Gambar 2 Pembentukan Tim Fasilitator	16
Gambar 3 Rapat Pertemuan Ditingkat Daerah Irigasi.....	17

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengelolaan irigasi pertanian partisipatif merupakan salah satu strategi dalam penguatan kemampuan kelembagaan irigasi, petani pemakai air, dan penerima manfaat irigasi lainnya. Mengingat keberagaman pihak terkait irigasi, diperlukan perencanaan yang tepat, terpadu dan terintegrasi dalam program penguatan dan pengembangan tersebut.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam untuk mendukung proses perencanaan yang tepat, terpadu, dan terintegrasi adalah Profil Sosial, Ekonomi, Teknis, Kelembagaan (PSETK). Secara konseptual, PSETK dapat didefinisikan sebagai gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang membantu Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) dalam perencanaan program pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A untuk meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi pertanian partisipatif.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka PSETK dimaksudkan untuk menyediakan data atau informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam program pemberdayaan kelembagaan petani Daerah Irigasi melalui P3A/GP3A/IP3A bersama Poktan/Gapoktan menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi pertanian partisipatif dan berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan PSETK perlu diselenggarakan secara tepat melalui metode pendekatan tertentu sesuai kebutuhan. Ketidaktepatan metode pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan PSETK dapat menyebabkan deviasi (penyimpangan) dalam merumuskan penyusunan program pengelolaan dan pengembangan irigasi pertanian di masing masing daerah irigasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan yang dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan langkah-langkah kegiatan yang diperlukan dalam penyusunan PSETK.



Gambar 1. Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

I.2 Maksud dan Tujuan

Panduan kegiatan PSETK dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi-Pertanian (PPSI) dimaksudkan sebagai media untuk:

1. Meningkatkan pemahaman Kelembagaan Pengelola Irigasi dan pengguna lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan PSETK dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan PSETK.

2. Meningkatkan kemampuan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan pengguna lainnya dalam persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil kegiatan PSETK.
3. Meningkatkan kemampuan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan pengguna lainnya dalam merumuskan program kerja pemberdayaan kelembagaan irigasi.

I.3 Sasaran

Terselenggaranya penyusunan PSETK dalam rangka PPSI yang dapat menyediakan data dan informasi aktual, akurat secara tepat untuk penyusunan rencana kerja tahunan dan jangka panjang dalam meningkatkan kinerja program pemberdayaan kelembagaan irigasi pada satu daerah irigasi, baik kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten.

I.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan penyusunan PSETK meliputi:

1. Prinsip-prinsip PSETK
2. Pendekatan dan metode penyusunan PSETK
3. Tahapan kegiatan penyusunan PSETK
4. Evaluasi dan pembaruan dokumen PSETK
5. Pembiayaan Kegiatan PSETK

I.5 Pengertian Umum

Beberapa pengertian umum yang terkait dan konsepnya digunakan dalam materi panduan ini adalah sebagai berikut:

1. **Analisis gender** adalah Analisa secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengkases dan memanfaatkan, partisipasi dan kontrol intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
2. **Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI)** adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata dilapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi.
3. **Daerah Irigasi** adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi-pertanian.
4. **Dana Pengelolaan Irigasi (DPI)**, adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pengelolaan irigasi.
5. **Gabungan Kelompok Tani** yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
6. **Gabungan petani pemakai air** yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
7. **Gender** adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

8. **Induk perkumpulan petani pemakai air** yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
9. **Irigasi-pertanian** adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi- air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. **Iuran pengelolaan irigasi** adalah iuran dari para anggota P3A yang dikumpulkan, dikelola dan dimanfaatkan oleh P3A untuk pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi-pertanian lainnya yang menjadi tanggung jawabnya serta pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi-pertanian.
11. **Jaringan irigasi** adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi-pertanian.
12. **Jaringan irigasi primer** dan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan saluran pembuangannya; bangunan bagi, bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
13. **Jaringan tersier** adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, Boks tersier, Boks kwarter dan bangunan pelengkap.
14. **Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)** meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.
15. **Kelompok Tani** yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. **Kelompok Wanita Tani** selanjutnya disingkat KWT merupakan kumpulan para wanita tani yang berada di satu desa. biasanya kelompok wanita tani ini berisikan istri-istri dari petani yang ingin mempunyai kegiatan lain selain bertani.
17. **Kerjasama pengelolaan irigasi (KSP)** adalah kerjasama antara P3A/GP3A/IP3A dengan Dinas PSDA/Sub Dinas PSDA/Pengairan dan atau pihak lain untuk pengelolaan irigasi, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
18. **Komisi Irigasi Kabupaten/Kota** adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
19. **Komisi Irigasi Provinsi** adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada provinsi yang bersangkutan.
20. **Masyarakat petani** adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun kelompok petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;
21. **Pemahaman Partisipatif Kondisi daerah Irigasi-pertanian**, selanjutnya disebut PPKDI adalah salah satu metode yang dikembangkan dari metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dalam pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif dan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A sebagai pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan PSETK.

22. **Pembentukan perkumpulan petani pemakai air** adalah upaya yang dilakukan petani pemakai air secara demokratis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
23. **Pemberdayaan P3A** adalah upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.
24. **Pengarustamaan Gender** adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakandan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan, dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi,dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
25. **Penguatan perkumpulan petani pemakai air** adalah upaya peningkatan status kelembagaan/kelembagaan perkumpulan petani pemakai air secara demokratis sebagai badan yang otonom dan mempunyai hak untuk memperoleh hak guna pakai air untuk irigasi dan untuk meningkatkan usaha tani yang berbasis air irigasi.
26. **Peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air** adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan perkumpulan petani pemakai air pada aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi-pertanian secara mandiri diwilayah kerjanya.
27. **Penyuluh pertanian adalah perorangan warga Negara Indonesia** yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
28. **Perencanaan yang responsif gender** adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengkases dan memanfaatkan intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
29. **Perkumpulan petani pemakai air** yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
30. **Petani pemakai air** adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi-pertanian termasuk irigasi-pertanian pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi-pertanian, dan pemakai air irigasi-pertanian lainnya;
31. **Profil Sosial Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan**, selanjutnya disebut PSETK adalah gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang dibutuhkan oleh Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) untuk perencanaan program pemberdayaan kelembagaan petani daerah irigasi melalui P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif.
32. **Sensitif gender** adalah kemampuan dan kepekaan dalam melihat dan menilai berbagai aspek kehidupan dan hasil pembangunan dari perspektif gender, seperti perbedaan aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan.
33. **Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi**, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia
34. **Kelompok Pendamping Lapangan**, selanjutnya disebut KPL adalah tenaga pemerintah daerah yang bertugas di lapangan terdiri dari unsur pertanian, unsur pengairan dan

unsur pemerintah kecamatan/ desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan kelembagaan petani P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan.

35. **Tenaga Pendamping Masyarakat**, selanjutnya disebut TPM adalah tenaga yang dibutuhkan untuk mendampingi masyarakat petani pemakai air dan pengurus P3A/GP3A/IP3A menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PSETK

Penyelenggaraan kegiatan PSETK dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Partisipatif.** Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PSETK mempunyai peran dan kepentingan yang sama, sehingga keterlibatan semua pihak sangat diperlukan.
2. **Sensitif gender,** mampu dan peka dalam melihat dan menilai berbagai aspek kehidupan dan hasil pembangunan dari perspektif gender, seperti perbedaan aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan.
3. **Kemandirian.** Pelaksanaan kegiatan PSETK dilaksanakan dengan spirit membangun kemandirian melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal.
4. **Akurasi, Validitas Dan Keterwakilan.** Data dan informasi yang dikumpulkan harus akurat dan valid sehingga membutuhkan ketelitian yang memadai dalam mencermati kondisi yang ditemukan di lapangan, dan informasi mewakili kebutuhan aspek aspek yang digali.
5. **Kerjasama Tim.** Penyelenggaraan kegiatan PSETK diwujudkan dalam kerjasama antarpihak yang terkait dalam suatu tim (KPL, P3A/GP3A/IP3A/Poktan/Gapoktan, dan TPM/ KTPM).
6. **Belajar Bersama.** Kegiatan PSETK diselenggarakan sebagai proses pembelajaran bersama dengan mengutamakan kolektivitas berdasarkan pendekatan pembelajaran sosial.
7. **Peningkatan Kinerja.** Hasil keseluruhan kegiatan PSETK selalu ditujukan dalam rangka meningkatkan kinerja, sehingga penggalian data dan informasi yang tepat memberikan masukan bagi perbaikan program dan rencana kerja pengembangan dan pengelolaan irigasi pertanian pada masa mendatang.
8. **Sederhana dan hasil dapat diterapkan.** Penggalian informasi dan Penyusunan dokumen PSETK dilaksanakan secara sederhana, lebih diutamakan bahwa dokumen tersebut dapat digunakan untuk keberlanjutan penanganan pengembangan dan pengelolaan irigasi pertanian.

BAB III PENDEKATAN DAN METODE PENYUSUNAN PSETK

III.1 Pendekatan Penyusunan PSETK

PSETK merupakan data yang dibutuhkan oleh semua pihak yang memiliki kepentingan dalam hal Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi-pertanian Partisipatif (PPSI) sehingga melibatkan berbagai pihak dalam melakukan penyusunannya. Pendekatan dalam penyusunan PSETK adalah *pendekatan partisipatif* mulai dari penajagan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Partisipatif yang dimaksud dalam hal ini adalah terlibatnya masyarakat baik perempuan dan laki-laki dengan persentase keterlibatan perempuan sebesar 30% di Daerah Irigasi dalam input data dan memberikan informasi tentang kondisi Daerah Irigasi. Diharapkan output PSETK mampu menjawab kebutuhan data dan informasi dan dapat digunakan untuk berbagai perencanaan program kegiatan di Daerah Irigasi yang bersangkutan. Dengan pendekatan partisipatif pula masyarakat menjadi merasa memiliki dan berkepentingan dalam melakukan pengelolaan irigasi-pertaniannya.

III.2 Metode Penyusunan PSETK

Untuk menjembatani antara kemudahan dalam penyusunan PSETK namun tetap mempertahankan pelibatan masyarakat, maka diperlukan metode yang tepat dalam penyusunannya. Dari berbagai metode pengenalan wilayah yang ada, salah satu alternatif metode yang digunakan dalam penyusunan PSETK adalah **Metode Pemahaman Partisipatif Kondisi Daerah Irigasi (PPKDI)**.

Metode PPKDI merupakan salah satu metode yang dikembangkan dari metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dalam pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif. Metode tersebut dipandang memiliki teknik-teknik yang dijabarkan cukup operasional dengan penekanan terhadap keterlibatan masyarakat pada seluruh kegiatan. Penerapan metode PPKDI dapat memberi peluang yang lebih besar dan terarah untuk melibatkan masyarakat petani pemakai air, sehingga dicapai kesesuaian dan ketepatan program kegiatan pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif dan pemberdayaan kelembagaan dengan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap air irigasi pada suatu daerah irigasi.

Metode PPKDI dimaksudkan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan masyarakat petani pemakai air pada suatu daerah irigasi, yang memungkinkan mereka dapat saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuannya tentang kondisi seluruh aspek yang terdapat pada suatu daerah irigasi, membuat rencana dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif dan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A beserta Poktan/Gapoktan di wilayah DI tersebut dengan baik.

Pelaksanaan penyusunan PSETK dapat dilakukan secara swakelola maupun kontraktual dengan ketentuan harus melibatkan masyarakat dan memenuhi prinsip-prinsip partisipatif.

III.3 Prinsip Dasar Metode PPKDI

Prinsip dasar dalam metode PPKDI adalah:

1. Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman dengan Masyarakat Petani Pemakai Air

Prinsip dasar metode PPKDI adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat petani pemakai air. Hal tersebut berarti bahwa metode PPKDI dibangun dari pengakuan serta kepercayaan masyarakat petani pemakai air, yang meliputi pengetahuan tradisional dan kemampuan mereka untuk memecahkan persoalannya sendiri. Prinsip ini merupakan pembalikan dari metode pembelajaran konvensional yang bersifat mengajari masyarakat.

2. Kesamaan Kepentingan dan Suasana Informal

Masyarakat petani pemakai air secara hidrologis terdiri dari kelompok masyarakat petani yang berada di hulu, tengah, dan hilir jaringan irigasi. Permasalahan yang dihadapi dari setiap kelompok masyarakat tersebut dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi hidrologis suatu jaringan irigasi. Oleh karena itu, keterlibatan semua kelompok masyarakat petani baik yang berada di wilayah hulu, tengah, dan hilir perlu disatukan dalam suatu kepentingan yang sama terhadap air irigasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan PPKDI perlu diselenggarakan dengan suasana yang luwes, terbuka, dan informal. Situasi santai dan kekeluargaan dapat mendorong kegiatan penerapan metode PPKDI berjalan dengan baik.

3. Orang Luar Sebagai Fasilitator, Masyarakat Sebagai Pelaku.

Konsekuensi dari prinsip pertama, peran orang luar hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku, guru, penyuluh, instruktur, dan lain-lain. Hal yang penting lainnya adalah menempatkan masyarakat sebagai narasumber utama. Pada tingkat penerapannya, masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Secara ideal, penentuan dan penggunaan teknik dan materi sebaiknya dikaji bersama, dan seharusnya banyak ditentukan oleh masyarakat petani pemakai air.

4. Konsep Triangulasi

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan valid, digunakan konsep triangulasi sebagai bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang (*check and recheck*), yang dilakukan melalui penganekaragaman keanggotaan tim (disiplin ilmu), sumber informasi (latar belakang golongan masyarakat, tempat), dan variasi teknik.

5. Mengoptimalkan Hasil, Berorientasi Praktis dan Keberlanjutan Program

Pelaksanaan penerapan metode PPKDI memerlukan waktu, narasumber, pelaksana yang trampil, dan partisipasi masyarakat petani pemakai air yang terkait. Untuk itu, optimalisasi hasil dengan pilihan yang menguntungkan harus dipertimbangkan, termasuk kuantitas dan akurasi informasi. Orientasi PPKDI adalah pemecahan masalah dan pengembangan program, sehingga dibutuhkan penggalian informasi yang tepat dan benar. Masalah dan kepentingan masyarakat selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pengenalan masyarakat bukan usaha yang sekali kemudian selesai, namun merupakan usaha yang berlanjut.

III.4 Teknik Penerapan PPKDI

Beberapa jenis kegiatan dalam penerapan metode PPKDI antara lain:

1. Penelusuran alur sejarah
2. Penelusuran jaringan irigasi dan kebutuhan akan perbaikan
3. Analisis mata pencaharian petani
4. Pembuatan sketsa peta dan pemetaan
5. Penyusunan rencana kegiatan

6. Diskusi Kelompok dan pembahasan masalah

Teknik penerapan PPKDI ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan berdasarkan temuan masalah dan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan oleh tim fasilitator. Teknik ini bisa dilakukan secara kombinasi sesuai dengan kebutuhan dan persoalan di lapangan.

BAB IV TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN PSETK

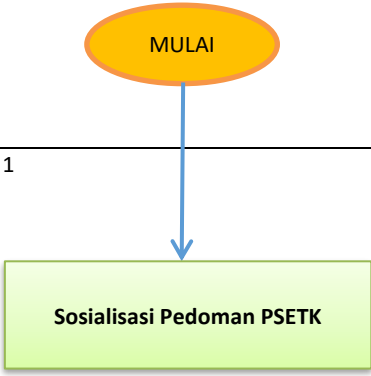
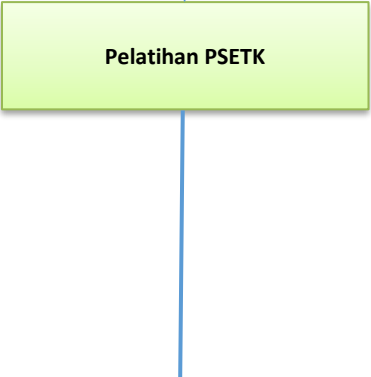
IV.1 Bagan Alir Tahapan Kegiatan Penyusunan

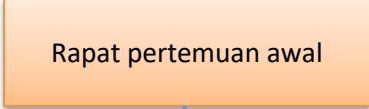

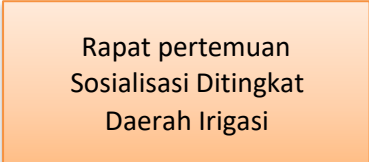
Tahapan kegiatan penyusunan PSETK meliputi tahapan:

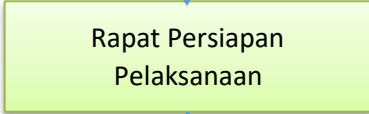
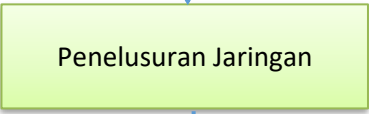

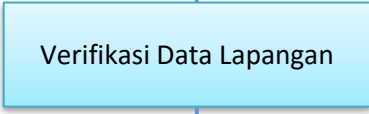
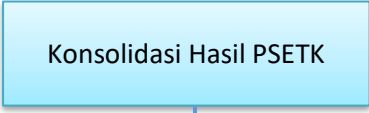
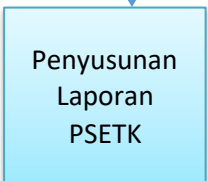
1. Tahap persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Penyusunan Laporan
4. Tahap Akhir

Tahapan tahapan tersebut dapat dilihat pada table bagan Alir dibawah ini:

Tabel 1 Bagan Alir Tahapan kegiatan Penyusunan PSETK

	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan
			
PERSIAPAN	1	<p>Tujuan diselenggarakannya sosialisasi Pedoman PSETK adalah sebagai berikut :</p> <p>(a) Menyebarluaskan pengertian PSETK kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap PPSI</p> <p>(b) Menyamakan persepsi tentang PSETK kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap PPSI</p> <p>Peserta : BBWS , Bappeda Provinsi/Kabupaten , Dinas PU Provinsi/Kabupaten dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten</p>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
	2	<p>Tujuan diselenggarakannya pelatihan PSETK adalah dalam rangka peningkatan kemampuan para peserta pelatihan dalam penyusunan PSETK yang handal dan professional.</p> <p>Tujuan :</p> <p>(a) Peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam pemahaman dan pengembangan kemampuan penerapan pendekatan partisipatif.</p> <p>(b) Peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam pemahaman dan pengembangan kemampuan penyusunan PSETK dengan metode pendekatan partisipatif potensi berdasarkan potensi sumber daya lokal yang tersedia pada suatu daerah irigasi.</p> <p>Peserta: BBWS, Bappeda Provinsi/Kabupaten, Dinas PU Provinsi/Kabupaten dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten</p>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
			

PERSIAPAN	3		<p>Agenda Rapat : Sosialisasi penyusunan PSETK dan Pembentukan TIM penyusun dan fasilitator PSETK</p> <p>Pada tahap ini pengelola menyiapkan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka acuan kerja • Daftar peserta/undangan • Daftar Hadir • Jadwal dan agenda pertemuan • Materi yang diperlukan untuk kegiatan PSETK <p>Hasil Pertemuan Rapat Berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notulensi <p>Penyelenggara : BBWS (DI Kewenangan Pusat), Bappeda Prorinsi (DI Kewenangan Provinsi) dan Bappeda Kabupaten (DI Kewenangan Kabupaten)</p> <p>Peserta: Unsur Pemerintah (Bappeda, Dinas PU SDA dan Dinas Pertanian) dan Unsur Non Pemerintah TPM/KTPM, KPL, P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan, KWT.</p> <p>Estimasi peserta masing masing unsur 3 orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BBWS pada DI Kewenangan Pusat - Bappeda Provinsi pada DI Kewenangan Provinsi - Bappeda Kabupaten pada Kewenangan Kabupaten
	4		<p>SK Tim Penyusun Dikeluarkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DI Kewenangan Pusat Oleh Kepala BBWS - DI Kewenangan Provinsi oleh Kepala Bappeda Provinsi - DI Kewenangan Kabupaten oleh Kepala Bappeda Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - BBWS pada DI Kewenangan Pusat - Bappeda Provinsi pada DI Kewenangan Provinsi - Bappeda Kabupaten pada Kewenangan Kabupaten
	5		<p>Pelaksana Kegiatan TIM Penyusun PSETK Lokasi Kegiatan Ditingkat Daerah Irigasi</p> <p>Pertemuan koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait untuk membahas mekanisme kegiatan PSETK</p> <p>Peserta Terdiri Dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perwakilan masyarakat petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya. - Pengurus kelembagaan P3A/GP3A/IP3A/Poktan/Gapoktan/KWT - Kelompok Pendamping Lapangan (KPL), meliputi Mantri/Juru Pengairan, Penyuluh Pertanian Lapangan, Aparat Desa dan Kecamatan. - Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM; dan - Tokoh masyarakat/adat/agama. <p>Hasil Pertemuan Rapat Berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notulensi 	<p>Tim Penyusun</p>

PELAKSANAAN	6		<p>Agenda Pertemuan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman dan cara pengisian form isian PSETK - Pemahaman teknik pengumpulan data - Penyusunan Jadwal Pelaksanaan, - Pembagian TIM (apabila Daerah Irigasinya Luas) - Analisis kebutuhan Pelaksanaan. <p>Peserta : TIM Penyusun/fasilitator</p> <p>Hasil Pertemuan Rapat Berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notulensi - Berita Acara Hasil Pertemuan 	Tim Penyusun
	7		<p>Pada Tahapan Ini dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data sekunder. Kegiatan ini merupakan tugas dari tim penyusun - penelusuran jaringan dan pengisian data Primer sesuai Form yang disediakan dalam panduan. Kegiatan ini merupakan tugas dan tanggung jawab tim fasilitator 	Tim Penyusun dan Tim Fasilitator
	8		<p>Tujuan FGD untuk memperdalam dan mengidentifikasi masalah-masalah di DI dan sekitarnya, tersusunnya gagasan penanganan masalah, tersusunnya skala prioritas penanganan masalah (seperti ketidakadilan gender, perbaikan jaringan irigasi pada area dan lokasi sepanjang jaringan yang menjadi Prioritas, revitalisasi pembentukan P3A/GP3A/IP3A/Poktan/Gapoktan/KWT) menurut kelompok dan anggota masyarakat.</p> <p>Keluaran : Berita Acara hasil FGD</p>	Tim Penyusun dan Tim Fasilitator
PENYUSUNAN LAPORAN	9		<p>Tujuan verifikasi adalah untuk menelaah secara mendalam validitas data lapangan yang dilakukan oleh tim penyusun, apabila dirasa kurang maka dilakukan kembali pengumpulan data yang validitasnya dapat diakui</p> <p>Pada tahapan ini tim penyusun berkoordinasi dengan tim fasilitator.</p>	Tim Penyusun
	10		<p>Setelah dianalisis dan diverifikasi maka dilakukan konsolidasi kan hasil dari masing masing tim untuk disusun menjadi dokumen PSETK</p> <p>pada tahapan ini dibuatkan berita acara hasil konsolidasi psetk</p>	Tim Penyusun
	11		<p>Tim penyusun membuat draft dokumen psetk hasil konsolidasi data PSETK</p>	Tim Penyusun

PENYUSUNAN LAPORAN	12		<p>Finalisasi laporan berupa kegiatan pertemuan pembahasan dokumen PSETK antara tim penyusun dengan unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DI kewenangan pusat (BBWS, Bappeda Prov/ Kab, Dinas Pertanian Prov/Kab) - DI kewenangan Provinsi (Bappeda Provinsi, Dinas PU SDA Provinsi dan Dinas Pertanian Prov/Kab) - DI kewenangan Kabupaten (Bappeda Kabupaten, Dinas PU SDA Kabupaten dan Dinas Pertanian Kabupaten <p>Apabila masih kurang baik dalam isi dokumen tersebut maka diperbaiki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BBWS pada DI Kewenangan Pusat - Bappeda Provinsi pada DI Kewenangan Provinsi - Bappeda Kabupaten pada Kewenangan Kabupaten
	13		<p>Legalisasi yang dimaksud adalah dengan ditandatangani dokumen tersebut Oleh masing masing kewenangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan Pusat oleh Kepala BBWS - Kewenangan Provinsi oleh Kepala Bappeda Provinsi - Kewenangan Kabupaten oleh Kepala Bappeda Kabupaten <p>Keluaran Berupa Dokumen Legal PSETK</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BBWS pada DI Kewenangan Pusat - Bappeda Provinsi pada DI Kewenangan Provinsi - Bappeda Kabupaten pada Kewenangan Kabupaten
TAHAP AKHIR	14		<p>Dokumen PSETK disampaikan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan Pusat disampaikan pada Ditjen Bina Bangda, Bappeda Prov/Kab, Dinas PU SDA Prov/Kab, Dinas pertanian Prov/Kab dan P3A/GP3A/IP3A atau Poktan/Gapoktan sesuai kewenangan - Kewenangan Provinsi disampaikan pada Ditjen Bangda, Dinas PU SDA Prov, Dinas pertanian Prov dan P3A/GP3A/IP3A atau Poktan/Gapoktan sesuai kewenangan - Kewenangan Kabupaten disampaikan pada Ditjen Bina Bangda, Dinas PU SDA, Kab, Dinas pertanian Kab dan P3A/GP3A/IP3A atau Poktan/Gapoktan sesuai kewenangan <p>Keluaran: berita acara Penyerahan Dokumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BBWS pada DI Kewenangan Pusat - Bappeda Provinsi pada DI Kewenangan Provinsi - Bappeda Kabupaten pada Kewenangan Kabupaten

IV.2 Tahap Persiapan

IV.2.1. Sosialisasi PSETK

Tahapan awal kegiatan penyusunan PSETK adalah sosialisasi PSETK dengan sasaran semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

dengan materi penjelasan tentang kegiatan penyusunan PSETK berdasar panduan PSETK dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI). Sedang maksud dan tujuan diselenggarakannya sosialisasi PSETK adalah sebagai berikut :

- (a) Menyebarluaskan pengertian PSETK kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap PPSIP
- (b) Menyamakan persepsi tentang PSETK kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap PPSIP

IV.2.2. Pelatihan PSETK

Pelatihan PSETK diarahkan pada upaya untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan para peserta pelatihan dalam penyusunan PSETK metode pendekatan partisipatif. Sedangkan tujuan yang diharapkan tercapai adalah:

1. Peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam pemahaman dan pengembangan kemampuan penerapan pendekatan partisipatif.
2. Peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam pemahaman dan pengembangan kemampuan penyusunan PSETK dengan metode pendekatan partisipatif potensi berdasarkan potensi sumber daya lokal yang tersedia pada suatu daerah irigasi.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan penyusunan PSETK adalah sebagai berikut:

Identifikasi Peserta, Narasumber dan Materi Pelatihan

Peserta kegiatan pelatihan antara lain adalah BBWS, Bappeda Provinsi/Kabupaten, Dinas PU Provinsi/Kabupaten dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten. Instruktur atau nara sumber pelatihan dapat berasal dari unsur Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi (PT) yang mempunyai kemampuan materi sesuai kebutuhan pelatihan.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan sekurang-kurangnya meliputi aspek:

1. Konsep PSETK dalam pengelolaan irigasi partisipatif;
2. Metode dan Pendekatan Partisipatif;
3. Teknik Pengumpulan Data seperti teknik penelusuran jaringan, diagram ven, kalender musim dan lain-lain yang tepat sesuai dengan kebutuhan data di lapangan dan dapat dikembangkan oleh pelaksana di lapangan;
4. Teknik Analisis Data dan Pelaporan PSETK
5. Rencana tindak lanjut PSETK dan program pemberdayaan organisasi P3A/GP3A/IP3A.

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Kegiatan pelatihan diselenggarakan dengan memperhatikan aspek :

- Demokrasi : pembelajaran didasarkan pada penggalian potensi peserta serta sesuai kesepakatan dengan peserta melalui mekanisme kontrak belajar.

- Partisipasi : pelibatan peserta pelatihan secara aktif baik dalam perencanaan, proses kegiatan, maupun evaluasi kegiatan.
- Proses : kegiatan pelatihan dibangun melalui teknik presentasi, diskusi dan simulasi (termasuk praktek kerja/ hands on training) yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran.
- Kondusif : suasana belajar diciptakan secara santai, praktis, dan atas dasar semangat dan motivasi peserta untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik.

Pelatihan dilaksanakan melalui kegiatan dalam ruangan maupun kegiatan di lapangan. Kegiatan dalam ruang meliputi penyampaian materi, diskusi dengan fasilitator, diskusi antar peserta yang difasilitasi oleh fasilitator serta perumusan materi yang dapat disajikan secara sederhana oleh peserta pelatihan. Selain itu juga perlu ditunjang dengan praktek lapangan di suatu daerah irigasi yang dekat dengan lokasi kegiatan pelatihan.

IV.2.3. Rapat Pertemuan Awal

Pada tahap persiapan diperlukan kegiatan pertemuan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait penyusunan PSETK dan pembentukan tim penyusun PSETK. Pihak-pihak yang dimaksud sedikitnya terdiri dari BBWS, Bappeda, Dinas PU yang membidangi Irigasi/ Juru Pengairan, Dinas pertanian Kabupaten/ Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), KPL, P3A/GP3A/IP3A, dan Poktan/Gapoktan, KPL dan TPM (sesuai dengan DI Kewenangannya). Pertemuan koordinasi dapat difasilitasi oleh BBWS untuk DI kewenangan Pusat, Bappeda Provinsi untuk DI kewenangan Provinsi dan Bappeda Kabupaten untuk DI kewenangan Kabupaten.

Dalam tahapan ini diharapkan peserta rapat dapat memahami tentang maksud dan tujuan dari kegiatan penyusunan dan dapat dibentuk tim penyusun PSETK. Pembentukan tim Penyusun didasarkan pada kebutuhan, mewakili kelompok kepentingan dalam masyarakat secara berimbang dan saling melengkapi¹. Secara umum, tim penyusun meliputi :

1. Tim Penyusun PSETK di DI Kewenangan Pusat
 - a. Tim Penyusun :
 - Ketua, berasal dari unsur pemerintah dalam hal ini dari unsur BBWS
 - Anggota, berasal dari unsur pemerintah Dinas PU Prov/Kab, Bappeda Prov/Kab dan Dinas Pertanian Prov/Kab
 - b. Fasilitator :
 - Koordinator Fasilitator, berasal dari unsur BBWS
 - Anggota, Berasal dari Dinas PU yang membidangi Irigasi/ Juru Pengairan, Bappeda dan Dinas pertanian Kabupaten/ Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), KPL, P3A/GP3A/IP3A, dan Poktan/Gapoktan, KWT, KPL dan TPM.
2. Tim Penyusun PSETK di DI Kewenangan Provinsi
 - a. Tim Penyusun :
 - Ketua, berasal dari unsur pemerintah dalam hal ini dari unsur Bappeda Provinsi

¹ Tim penyusun PSETK dapat dijabat oleh staf /fungsional umum dari masing – masing OPD.

- Anggota, berasal dari unsur pemerintah Dinas PU SDA Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi
- b. Fasilitator :
 - Koordinator Fasilitator, berasal dari unsur Bappeda Provinsi
 - Anggota, Berasal dari Dinas PU yang membidangi Irigasi/ Juru Pengairan, Dinas pertanian Provinsi/ Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), KPL, P3A/GP3A/IP3A, dan Poktan/Gapoktan, KWT, KPL dan TPM.
- 3. Tim Penyusun PSETK di DI Kewenangan Kabupaten
 - a. Tim Penyusun :
 - Ketua, berasal dari unsur Bappeda Kabupaten
 - Anggota, berasal dari unsur pemerintah Dinas PU SDA Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi
 - b. Fasilitator :
 - Koordinator Fasilitator, berasal dari unsur Bappeda Kabupaten
 - Anggota, Berasal dari Dinas PU yang membidangi Irigasi/ Juru Pengairan, Dinas pertanian Kabupaten/ Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), KPL, P3A/GP3A/IP3A, dan Poktan/Gapoktan, KWT, KPL dan TPM



Gambar 2 Pembentukan Tim Fasilitator

Secara Umum Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun /fasilitator adalah sebagai berikut:

- Konsolidasi dan koordinasi kepada seluruh pihak terkait dalam menetapkan tujuan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya, penentuan kebutuhan data dan informasi (termasuk data sekunder) untuk menghemat tenaga, waktu, dan biaya, pembuatan jadwal tentatif yang akan dikonsultasikan dengan masyarakat petani pemakai air
- Menyelenggarakan pertemuan persiapan pelaksanaan kegiatan.
- Penggalan informasi, menganalisis dan mencatat butir-butir penting, dan mendorong mekanisme diskusi yang baik.
- Melakukan dokumentasi proses dan hasil kegiatan secara lengkap dan rinci.
- Analisis dan pembahasan hasil fasilitasi sebagai input dalam penyusunan laporan kegiatan.

IV.2.4. Penerbitan SK Tim Penyusun PSETK

Dasar penerbitan SK tim penyusun PSETK adalah hasil kesepakatan bersama pembentukan tim penyusun pada pertemuan awal dalam bentuk berita acara Hasil Pertemuan Awal Kegiatan Penyusunan PSETK. SK tim penyusun dikeluarkan sesuai dengan kewenangannya yaitu sebagai berikut:

1. SK Tim Penyusun untuk DI kewenangan Pusat dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
2. SK Tim Penyusun untuk DI kewenangan Provinsi dikeluarkan oleh Kepala Bappeda Provinsi
3. SK Tim Penyusun untuk DI kewenangan Kabupaten dikeluarkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten

IV.2.5. Rapat Pertemuan Sosialisasi di Tingkat Daerah Irigasi

Pada tahap persiapan diperlukan kegiatan pertemuan koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait untuk membahas mekanisme pelaksanaan kegiatan PSETK dalam rangka PPSI.

Pihak-pihak yang dimaksud sedikitnya terdiri dari:

- (1) Masyarakat petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya.
- (2) Pengurus organisasi P3A/GP3A/IP3A
- (3) Kelompok Pendamping Lapangan (KPL), meliputi Mantri/Juru Pengairan, Penyuluh Pertanian Lapangan, Aparat Desa dan Kecamatan.
- (4) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM; dan
- (5) Tokoh masyarakat/adat/agama.

Pertemuan koordinasi tersebut dapat difasilitasi tim penyusun/fasilitator bersama-sama dengan TPM/KTPM, KPL dan GP3A/IP3A.



Gambar 3 Rapat pertemuan ditingkat daerah irigasi

Materi yang dibahas dalam pertemuan koordinasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- (1) Pemahaman bersama tentang teknik penyusunan PSETK dengan metode pendekatan partisipatif;
- (2) Kemanfaatan hasil PSETK bagi semua pihak-pihak yang terkait;
- (3) Membangun kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan penyusunan PSETK;
- (4) Identifikasi kebutuhan pelaksanaan penyusunan PSETK, termasuk kebutuhan pelatihan peningkatan kemampuan melaksanakan kegiatan penyusunan PSETK, termasuk penentuan nara sumber kegiatan pelatihan; dan

- (5) Penetapan rencana program kegiatan pelaksanaan PSETK dengan metode pendekatan partisipatif.

IV.3 Tahap Pelaksanaan

IV.3.1. Rapat Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap ini perlu disampaikan pada peserta rapat hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman Form PSETK

Form PSETK merupakan salah satu instrumen pengumpulan data di lapangan pada saat dilaksanakan penelusuran jaringan melalui metode PPKDI. Sebelum dilakukan penelusuran jaringan, perlu dilakukan penjelasan dan cara pengisian form PSETK serta teknik pengumpulan data di lapangan sehingga proses pencarian data lebih efektif dan efisien serta data yang dihasilkan lebih akurat dan valid. Form PSETK terlampir.

2. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan data

Jenis data untuk kebutuhan penyusunan PSETK meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat petani dan petugas pengelola irigasi yang terkait dengan irigasi yang ada di Daerah Irigasi, baik dari pencatatan data secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara maupun Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi seperti dari data monografi desa, monografi kecamatan dimana Daerah Irigasi yang bersangkutan berada, termasuk data sekunder pada dinas yang berkaitan dengan irigasi dan pertanian. Data yang dibutuhkan sebagai bahan kegiatan penyusunan PSETK adalah data yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan untuk peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif dan pemberdayaan kelembagaan petani daerah irigasi melalui P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan.

Data indikator yang diperlukan dalam penyusunan PSETK antara lain adalah:

Indikator Aspek Sosial :

- Gotong royong/tingkat swadaya masyarakat.
- Hubungan kemasyarakatan.
- Tingkat pendidikan petani.
- Status petani.
- Permasalahan sosial di lokasi.
- dan lain-lain (sesuai kebutuhan).

Indikator Aspek Ekonomi :

- Produktivitas hasil usahatani/luas dan jenis usaha tani.
- Tingkat pendapatan usahatani.
- Tingkat pendapatan rumah tangga petani.
- Potensi sumber daya lokal.
- Peluang usaha ekonomi produktif.
- Struktur mata pencaharian petani
- dan lain-lain (sesuai kebutuhan).

Indikator Aspek Teknis :

- Data umum DI
- Sejarah pembangunan DI
- Sumber air
- Ketersediaan air
- Kondisi fisik jaringan irigasi
- Pelaksanaan Operasi jaringan irigasi
- Pelaksanaan Pemeliharaan jaringan irigasi
- Pelaksanaan Rehabilitasi jaringan irigasi
- dan lain-lain (sesuai kebutuhan).

Secara umum, untuk menentukan kondisi kuantitatif bangunan dan saluran adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kuantitatif Kondisi Bangunan dan saluran

Tingkat Kerusakan	Kategori Kondisi
< 10%	Baik
10% - 20 %	Rusak Ringan
21% - 40%	Rusak Sedang
>40%	Rusak Berat

Dalam menentukan Kondisi fisik dan fungsi jaringan irigasi ada 3 kriteria kualitatif yang dinilai antara lain:

a. Kondisi Fisik Jaringan Irigasi

- Baik;
- Rusak Ringan;
- Rusak Sedang; dan
- Rusak Berat

Tabel 3 Indikator Deskriptif Kondisi Bangunan Sipil dan Lining

No	Kondisi	Kerusakan (salah satu atau semuanya)
1	Baik	Retak Rambut
2	Rusak Ringan	Retak Lebar Tergerus atau terkelupas Lapuk
3	Rusak Sedang	Terlihat besi penulangan Berongga Bengkok atau melengkung Bergeser dari tempat semestinya Posisi miring, seharusnya tegak Sebagian bangunan turun elevasinya Terjadi aliran air di bawah pondasi

No	Kondisi	Kerusakan (salah satu atau semuanya)
4	Rusak Berat	Hampir seluruh bangunan turun elevasinya Bangunan roboh

Tabel 4 Indikator Deskriptif Kondisi Pintu air

No	Kondisi	Kerusakan (salah satu atau semuanya)
1	Baik	Karatn ringan
2	Rusak Ringan	Mur dan baut hilang Batang pengangkat bengkok
3	Rusak Sedang	Berlubang dan bocor Karatn berat Batang pengangkat patah Hilangnya roda/stang pegangan Hilangnya gigi-gigi pengangkat Mesin pengangkat rusak TMesin pengangkat terbakar
4	Rusak Berat	Pintu hancur turun elevasinya Bangunan roboh

Tabel 5 Indikator Kondisi Tanggul Saluran

No	Kondisi	Kerusakan (salah satu atau semuanya)
1	Baik	Rembes
2	Rusak Ringan	Bocor kecil Bocor besar Tergerus dasar dan talud Rusak akibat ulah manusia/hewan
3	Rusak Sedang	Longsor ke arah dalam Longsor ke arah luar Muka tanggul turun
4	Rusak Berat	Tanggul jebol

b. Fungsi Fisik Jaringan Irigasi

- Baik
- Kurang
- Buruk
- Tidak Berfungsi

Fungsi dan kondisi dari jaringan irigasi harus dibedakan. Hal tersebut karena tidak selalu ada hubungan langsung kondisi dan fungsi suatu jaringan irigasi. Contoh: suatu saluran mengalami kerusakan yang cukup berat hingga dapat dikategorikan RB (Rusak Berat), namun masih bisa mengalirkan debit yang

sebagaimana diperlukan. Sebaliknya saluran yang kondisinya masih baik tetapi endapan lumpurnya tinggi, maka fungsinya telah banyak berkurang.

Fungsi bangunan air yang mempergunakan pintu air lebih banyak tergantung dari fungsi pintu air itu tersebut. Untuk Penelusuran Jaringan irigasi, kondisi dan fungsi bangunan-bangunan air dibedakan antara kondisi dan fungsi bangunan sipil dan kondisi dan fungsi dari bangunan ME (mekanikal elektrikal / pintu).

Sebagai acuan, dibawah ini diberikan indikator untuk menentukan kategori tingkatan fungsi dari suatu Jaringan Irigasi.

Tabel 6 Indikator Fungsi

Tingkat Kerusakan	Kategori Kondisi
0% - 20%	Baik
20% - 40 %	Kurang
40% - 80%	Buruk
80% - 100%	Tidak Berfungsi

c. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi

Terdapat beberapa indikator terkait dengan kegiatan O&P jaringan irigasi, yaitu:

- Indikator kesesuaian realisasi Rencana Tata Tanam (RTT) dan Rencana Pemberian Air (RPA) dengan rencana yang ditetapkan apakah sudah sejalan atau tidak mengalami perubahan waktu dan jumlah/debit yang diberikan.
- Indikator pelayanan kegiatan pengaturan operasi jaringan irigasi. Sebagai indikator adalah penerimaan air yang diberikan ke P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan yang direncanakan.

Tabel 7 Indikator Pelayanan

No	Penilaian	Indikator
1	Memuaskan	Pelayanan pengaturan sangat adil dan sesuai yang diharapkan
2	Cukup Memuaskan	Pelayanan yang diberikan cukup adil walaupun beberapa hal terjadi kekurangan dan tidak secara cepat merespon apabila terjadi konflik air
3	Tidak Memuaskan	Tidak sesuai dengan yang diharapkan/rencanakan serta tidak adil

- Indikator Aspek Kelembagaan:
 - Status Hukum/ keberadaan kelembagaan petani irigasi
 - Pembentukan lembaga P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan
 - Struktur kelembagaan, AD/ART dan kelengkapan kesekretariatan
 - Wilayah Kerja dan Program Kerja
 - Pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan

- Kinerja kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan
- Keberadaan kelembagaan Petani yang lainnya yang terdapat di Daerah Irigasi tersebut
- Pengelolaan administrasi dan keuangan lembaga (Buku-buku administrasi dan iuran anggota /IPI)
- dan lain-lain (sesuai kebutuhan).

Tabel 8 Kebutuhan Data dan Sumber Data untuk Kepentingan Organisasi P3A/GP3A/IP3A

Data yang dibutuhkan	Waktu	Dikumpulkan oleh siapa	Sumber data dari mana	Teknik Pengumpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kemauan untuk bayar iuran	Setelah musim panen kemudian diulang secara berkala	Pengurus	(P3A)Anggota	Wawancara
Produksi	Setiap panen	pengurus	Pengurus P3A dan Anggota	Observasi/wawancara
Ketersediaan tenaga OP (Gotong Royong)	Setiap tahun	pengurus	Pengurus P3A dan Anggota	Wawancara
Status pengelolaan dari Dinas (termasuk cara pembagian air)	Setiap saat	Pengurus	Dinas/Pemda	Wawancara
Status/Tupoksi petugas dinas di wilayah Gabungan	Setiap saat	Pengurus	Dinas/Pemda	Wawancara
Jumlah/status/luas areal/lokasi P3A (unit/tersier)	Sebelum pembentukan	KPL/TPM	Juru/Dinas/pengurus P3A	Survai
Daftar pengguna (P3A/industri/domestik), status pemilik/penggarap / penyewa dan pendidikan petani.	Per periode pengurus	Pengurus	Pengurus P3A/Anggota	Wawancara
Konflik pengelolaan	Secara berkala	pengurus	Berbagai sumber	Wawancara
Peta/skema wilayah (teknis/geografis)	Setiap saat/ penelusuran jaringan	KPL/TPM/Pengurus	Dinas/konfirmasi lapangan	Dokumentasi
Inventarisasi/Kondisi jaringan irigasi (buku catatan pemeliharaan)	Setiap saat/ penelusuran jaringan	Pengurus/KPL / TPM	Lapangan	Penelusuran
Kondisi ketersediaan air, cara kebiasaan pembagian air dan pemeliharaan	Setiap saat/ penelusuran jaringan	Kumpulkan oleh pengurus	Dinas/Lapangan	Wawancara
Jenis/pola penggunaan air	Periode pengurus	Pengurus	P3A/Anggota	Observasi
Pola/jadwal tanam	Per Tahun	Pengurus	P3A	Wawancara
Kespekataan kerja sama pengelolaan	Setiap saat/ penelusuran jaringan	Pengurus/Dinas	Nota Kerja sama	Observasi

Tabel 9 Kebutuhan Data dan Sumber Data untuk Kepentingan OPD, Komisi Irigasi dan Pihak Lainnya

Data yang dibutuhkan	Waktu	Dikumpulkan oleh siapa	Sumber data dari mana	Teknik Pengumpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Data pembayaran iuran	Setiap tahun	Dinas/ Komir	I/G/P3A	Wawancara
Produksi	Setiap panen	pengurus	Pengurus P3A Anggota	Observasi/ wawancara
Ketersediaan tenaga OP (Gotong Royong)	Setiap tahun	pengurus	Pengurus P3A Anggota	Wawancara
Status/Tupoksi petugas dinas di wilayah kerjanya	Setiap saat	Pengurus	Dinas/Pemda	Wawancara
Jumlah/status/luas areal/lokasi P3A (unit/tersier)	Sebelum pembentukan	KPL/TPM	Juru/Dinas/pengurus P3A	Wawancara
Daftar pengguna (P3A/industri/ domestik), status pemilik/penggarap/ penyewa dan pendidikan petani.	Per periode pengurus	Pengurus	Pengurus P3A/Anggota	Survei dan Wawancara
Konflik pengelolaan	Secara berkala	pengurus	Berbagai sumber	Wawancara
Peta/skema wilayah jaringan irigasi (teknis/geografis)	Setiap saat/ penelusuran jaringan	KPL/TPM/ Pengurus	Dinas/konfirmasi lapangan	Survei dan Wawancara
Inventarisasi/Kondisi jaringan irigasi (buku catatan pemeliharaan)	Setiap saat/ penelusuran jaringan	Pengurus/KPL/ TPM	Lapangan	Survei dan Wawancara
Kondisi sistem irigasi ketersediaan air, cara kebiasaan pembagian air dan pemeliharaan	Setiap saat/ penelusuran jaringan	Kumpulkan oleh pengurus	Dinas/Lapangan	Survei dan Wawancara
Jenis/pola penggunaan air	Per periode pengurus	Pengurus	P3A/Anggota	Survei dan Wawancara
Pola/jadwal tanam	Per Tahun	Pengurus	P3A	Survei dan Wawancara

Data-data yang dikumpulkan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan meliputi : mata pencaharian, status petani, luas garapan, kegiatan usaha tani, kelembagaan tradisional yang ada, cara pengelolaan irigasi, potensi sumber daya lokal, peluang usaha dan lain-lain. Data-data tersebut sebagai masukan dalam program pemberdayaan organisasi P3A/GP3A/IP3A menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif. Untuk pengisian aspek-aspek tersebut dapat diisikan pada *Formulir PSETK yang ada pada lampiran*.
- b. Aspek teknis irigasi meliputi : sumber air, ketersediaan dan kualitas air, potensi lahan, pengelolaan jaringan, sistem alokasi air, kondisi fisik dan tingkat keberfungsian jaringan irigasi, pola tanam dan produksi hasil usahatani, kebutuhan perbaikan dan lain-lain. Data-data tersebut sebagai masukan dalam program peningkatan kinerja jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi partisipatif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi petani. Untuk pengisian aspek-aspek tersebut dapat diisikan pada *Formulir PSETK yang ada pada lampiran*.

Sebelum melaksanakan PSETK harus dipahami substansi instrumen (Formulir Isian) dan cara pengisiannya yang mencakup :

- Keadaan Umum
- Kondisi Sumber Air, Ketersediaan Air, dan Alokasi Penggunaan Air
- Kondisi Teknik (Fisik dan Keberfungsian Jaringan Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat petani pemakai air
- Kondisi Kelembagaan petani/P3A
- Identifikasi potensi sumber daya lokal
- Identifikasi permasalahan, pemecahan masalah, dan penelusuran kebutuhan pelatihan
- Penerapan metode pendekatan partisipatif dalam penyusunan PSETK

3. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan

- Penentuan waktu dan lokasi kegiatan penyusunan PSETK melalui salah satu teknik penelusuran jaringan irigasi;
- Rencana pelaksanaan penyusunan PSETK dilakukan secara bersama-sama oleh tim pelaksana dengan penanggung jawab dari Bappeda. Lamanya pelaksanaan PSETK akan sangat tergantung pada luasan DI dan jarak jangkauan DI.

Berikut disajikan Kebutuhan waktu pelaksanaan PSETK.

Tabel 10 Contoh Kebutuhan Waktu Pelaksanaan PSETK

No	Jenis Kegiatan	Waktu								pelaksana	penanggung jawab	
		1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Rapat pertemuan Sosialisasi Ditingkat Daerah Irigasi	■									Tim Penyusun + Fasilitator	Tim Penyusun
2	Rapat Persiapan Koordinasi Pembentukan Tim, analisis kebutuhan, rencana jadwal		■								Tim Penyusun + Fasilitator	Tim Penyusun
3	Pengumpulan Data (sekunder)		■	■	■						Tim Penyusun + Fasilitator	Tim Penyusun
4	Penelusuran Jaringan			■	■	■					Fasilitator	Tim Penyusun
5	Verifikasi data PSETK				■	■					Tim Penyusun	Ketua Tim Penyusun
6	Konsolidasi Hasil PSETK					■	■				Tim Penyusun	Ketua Tim Penyusun
7	Penyusunan Laporan						■	■			Tim Penyusun	Ketua Tim Penyusun
8	Legalisasi								■		BBWS/Bappeda Prov/Bappeda Kab (sesuai kewenangan)	BBWS/Bappeda Prov/Bappeda Kab (sesuai kewenangan)
9	Penyampaian Laporan									■	BBWS/Bappeda, Dinas PU SDA, Dinas Pertanian, KPL, TPM, P3A/GP3A/IP3A (sesuai kewenangan)	BBWS/Bappeda Prov/Bappeda Kab (sesuai kewenangan)

Catatan :

Jadwal waktu diatur sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Pelaksanaan PSETK untuk DI lebih dari satu, dilakukan secara paralel oleh masing-masing tim agar lebih efektif.

4. Pembagian Kelompok Tim Pelaksana PSETK

- Karena jumlah Daerah Irigasi yang akan dilakukan penyusunan PSETK seringkali lebih dari satu Daerah Irigasi dan jangkauannya juga berbeda-beda maka pelaksanaan PSETK akan lebih efektif apabila dilakukan terlebih dahulu pembentukan TIM pelaksana.
- Tim yang dibentuk merupakan hasil kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang terlibat, yaitu unsur Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PSDA, TPM/KTPM, KPL, wakil P3A/GP3A pada Daerah Irigasi yang bersangkutan,
- Pembentukan Tim lebih diarahkan kepada upaya penyelesaian PSETK secara menyeluruh hingga penyelesaian laporan PSETK. Penanggung jawab pelaksana PSETK adalah Bappeda.
- Tim yang terbentuk dan melaksanakan PSETK selanjutnya menandatangani Berita Acara pelaksanaan PSETK.
- Berikut disajikan contoh pembentukan Tim pelaksana PSETK.

Tabel 11 Pembagian Kelompok Tim Pelaksana PSETK

No	Tim	Nama Pelaksana	Penanggung jawab	Nama Daerah Irigasi	Luas Areal (ha)	Nama P3A/GP3A
1.	Tim I	1..... (Bappeda) 2..... (Diperta) 3..... (Din PSDA) 4..... (TPM) 5.....	BBWS/Bappeda	Brojolele (contoh)	950	1. 2. 3. 4.
2.	Tim II	1..... (Bappeda) 2..... (Diperta) 3..... (Din PSDA) 4..... (TPM) 5.....	BBWS/Bappeda	Brojomele (contoh)	650	1. 2. 3. 4.
	Dst					

5. Analisa Kebutuhan

Inventarisasi sarana dan prasarana penunjang, meliputi:

- Alat tulis, kertas tulis dan kertas gambar, alat pengukur panjang (meteran), tali, kompas, dan keperluan lainnya sesuai kebutuhan.
- Dokumen penunjang (Buku Daerah Irigasi, Peta Jaringan Irigasi, Buku Catatan Operasi dan Pemeliharaan, atau dokumen lainnya yang diperlukan).
- Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan.

IV.3.2. Penelusuran Jaringan

Penelusuran jaringan irigasi dilakukan untuk mengetahui keadaan nyata jaringan irigasi yang terdapat pada suatu daerah irigasi baik berkaitan dengan kondisi, fungsi maupun permasalahannya serta mengumpulkan data dan informasi sebagai acuan dalam pembahasan program. Penelusuran jaringan melibatkan pengurus P3A/GP3A/IP3A, KPL, TPM dan KTPM, serta memungkinkan untuk pelibatan tokoh masyarakat/adat/agama.

Selama penelusuran jaringan irigasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Kondisi fisik dan tingkat kefungsi saluran dan bangunan irigasi, mulai dari hulu sampai hilir jaringan irigasi.
- Kondisi areal pertanian dan jenis usahatani yang dilakukan oleh masyarakat petani pemakai air.
- Permasalahan pertanian dan pengairan yang menjadi kendala masyarakat petani pemakai air setempat atau sumber lain yang ditemui selama observasi dilakukan.

Kegiatan penelusuran jaringan irigasi dapat dimulai dari hulu atau hilir jaringan irigasi sesuai kesepakatan bersama pada kegiatan persiapan. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama penelusuran jaringan irigasi adalah sebagai berikut:

- Pencatatan debit air dilakukan pada jaringan utama (primer dan sekunder) untuk melihat kondisi kecukupan air irigasi (jika memungkinkan melihat kualitas air secara kasat mata).
- Pengamatan terhadap kondisi fisik jaringan irigasi, baik bangunan maupun saluran irigasi, termasuk tingkat keberfungsian dalam mengamankan jalan air dari sumbernya menuju areal petakan pertanian.
- Pengamatan terhadap areal pertanian dengan membuat profil jenis dan luasan tanaman yang ditemukan selama observasi.
- Memetakan profil jaringan irigasi dari titik awal sampai titik akhir jaringan irigasi dengan menggunakan kompas.
- Hasil pengamatan dituangkan dalam kertas tulis maupun kertas gambar sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan PSETK (termasuk jarak lokasi pengamatan dari bendung sebagai titik awal).

IV.3.3. Penggalan Gagasan

Dalam pelaksanaan penelusuran jaringan irigasi perlu dilakukan proses penggalan gagasan melalui teknik diskusi kelompok melibatkan para peserta dan pelaksana PSETK di daerah irigasi. Diskusi perlu dilakukan untuk memperdalam identifikasi masalah-masalah di DI dan sekitarnya, tersusunnya gagasan penanganan masalah, tersusunnya skala prioritas penanganan masalah (seperti perbaikan jaringan irigasi pada area dan lokasi sepanjang jaringan mana yang menjadi prioritas, revitalisasi pembentukan P3A/GP3A, dsb) menurut kelompok dan anggota masyarakat. Teknis FGD dapat dilakukan pada saat penelusuran jaringan maupun berdiskusi di tempat tertentu pada waktu berlainan.

IV.4 Tahap Penyusunan Laporan

IV.4.1. Verifikasi Data PSETK

1. Verifikasi form isian hasil penelusuran jaringan

Form isian hasil penelusuran jaringan di daerah irigasi diverifikasi oleh tim penanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan kelengkapan data.

2. Validasi data-data pada form isian PSETK hasil penelusuran jaringan

Data-data yang ada dalam Form isian hasil penelusuran jaringan irigasi divalidasi oleh tim masing-masing dengan memperhatikan kelogisan dan kesesuaian data dengan fakta.

3. Pemenuhan Kelengkapan Data Sekunder

Tim perlu melengkapi data-data yang masih belum lengkap dan belum memenuhi standar data yang dibutuhkan PSETK melalui inventarisasi data dari instansi atau dinas terkait irigasi mulai dari Desa, Kecamatan, BPP, Dinas PSDA/pengairan, dinas Pertanian dan Bappeda atau dinas yang lainnya.

4. Analisis data PSETK

Analisis data merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan PSETK. Analisis hasil PSETK memuat informasi tentang persoalan yang mendasar yang terjadi di wilayah DI tersebut, ditinjau dari aspek :

- a) Sosial Ekonomi
- b) Teknik
- c) Kelembagaan
- d) Usaha Tani
- e) Potensi Sumber Lokal

Sehingga secara sederhana akan diperoleh pemetaan kondisi umum, sosial, ekonomi, teknik dan kelembagaan serta tersusunnya kompilasi skala prioritas dan upaya tindak lanjut versi Tim dan hasil penggalian gagasan. Apabila hasil dari analisa masih dirasakan kurang, tim penyusun dapat mengembalikan data lapangan tersebut pada fasilitator untuk melengkapi data tersebut hingga data tersebut dianggap valid.

IV.4.2. Konsolidasi Hasil PSETK

Data yang telah dianalisis oleh tim di masing-masing Daerah Irigasi disosialisasikan kepada anggota tim lainnya kemudian dikonsolidasikan. Konsolidasi hasil PSETK perlu mengingat Daerah Irigasi yang dilaksanakan PSETK cukup banyak. Melalui konsolidasi ini akan diketahui sampai sejauh mana kelengkapan dan kekurangan dari data-data dan analisis hasil PSETK yang ada, sehingga sebelum dilakukan penyusunan laporan semua kebutuhan data telah lengkap untuk melancarkan proses penyusunan laporan PSETK.

IV.4.3. Penyusunan Laporan PSETK

Penyusunan laporan merupakan langkah selanjutnya setelah data dan informasi dianalisis dan dikonsolidasi. Laporan dibuat per Daerah Irigasi sebagai bahan tindak lanjut penyusunan rencana kerja pada suatu daerah irigasi.

1. Syarat Umum Penyusunan Laporan

Berikut ini adalah syarat-syarat dari pembuatan laporan yang adalah sebagai berikut:

- a. Laporan harus benar dan efektif
 - a. Laporan tidak dibuat-buat
 - b. Tidak dikarang/direkayasa
 - c. Harus dapat dipertanggungjawabkan dimana:
 - i. Didukung data yang lengkap, relevan, akurat dan tidak kadaluwarsa
 - ii. Analisis persoalan harus objektif
 - b. Laporan harus jelas
 - a. Kalimat sederhana, pendek dan tidak berbelit-belit
 - b. Menggunakan istilah yang benar.
 - c. Menggunakan tata bahasa dan ejaan yang benar.
 - d. Menggunakan kalimat langsung, positif dan tidak kalimat ungkapan politis serta puitisasi.
 - c. Laporan harus lengkap.
 - a. Harus mencakup segala segi yang dilaporkan.
 - b. Uraian terfokus pada masalah.
 - c. Sebaiknya disertai data pendukung seperti dokumentasi, grafik, tabel, statistik, dll.
 - d. Laporan harus tegas dan konsisten
 - a. Tidak kontroversi antara bagian yang satu dengan yang lain.
 - b. Keterangan tidak berubah-ubah.
 - c. Gaya penulisan yang stabil.
 - d. Laporan harus tepat waktu.
 - e. Harus diterima oleh yang berkompeten/yang berhak menerima laporan.

2. Komposisi dan Sistematika Penyusunan Laporan PSETK

Laporan merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan penyusunan PSETK. Laporan berisi keterangan atau informasi yang dihimpun, diolah, dan disajikan secara tertulis setelah melakukan kegiatan pengamatan, penyelidikan, dan studi di lapangan. Berdasarkan hal itu, pada langkah persiapan penyusunan laporan diperlukan suatu kerangka pelaporan yang bisa menggambarkan secara utuh hasil dari penyusunan PSETK di lapangan. Laporan PSETK disampaikan untuk per Daerah Irigasi yang dilaksanakan PSETK.

Adapun komposisi dari kerangka laporan PSETK terdiri 3 *bagian*, yaitu :

I. **Bagian Muka**

COVER LAPORAN

CHECKLIST LAPORAN (contoh terlampir)

BERITA ACARA (contoh terlampir)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

II. Bagian Isi/Subtansi

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan PSETK
- 1.3. Keluaran Yang Diharapkan

Bab II. GAMBARAN UMUM DAERAH IRIGASI

Bab III. ANALISA DAN HASIL PSETK

Bab IV. MASALAH DAN REKOMENDASI

Bab V. PENUTUP

III. Bagian Lampiran dan Kelengkapan Dokumen

LAMPIRAN

IV.4.4. Finalisasi Laporan PSETK

Setelah draft PSETK dianggap final di tingkat tim penyusun, maka dokumen tersebut perlu dilakukan pembahasan dengan mengundang pihak terkait sesuai dengan DI kewenangannya baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Pada saat pembahasan dokumen sudah dianggap sempurna, maka dokumen tersebut dianggap final dan dapat dilegalisasi sesuai dengan DI kewenangannya, tetapi apabila masih terdapat kekurangan, maka tim penyusun harus memperbaikinya kembali.

IV.5 Tahap Akhir

IV.5.1. Legalisasi Dokumen PSETK

Dokumen PSETK yang sudah difinalkan, maka dilakukan legalisasi. Legalisasi yang dimaksud adalah dengan ditandatanganinya pada bagian kata pengantar oleh masing-masing DI kewenangannya adalah sebagai berikut:

- Kewenangan Pusat oleh Kepala BBWS
- Kewenangan Provinsi oleh Kepala Bappeda Provinsi
- Kewenangan Kabupaten oleh Kepala Bappeda Kabupaten

IV.5.2. Penyampaian Laporan PSETK

Sesuai dengan syarat pembuatan laporan diatas yang menyebutkan bahwa laporan harus diterima oleh yang berkompeten/yang berhak menerima, Setelah dokumen tersebut legal maka dapat disampaikan kepada:

- Kewenangan Pusat disampaikan pada Ditjen Bina Bangda, Bappeda Prov/Kab, Dinas PU SDA Prov/Kab, Dinas Pertanian Prov/Kab dan P3A/GP3A/IP3A atau Poktan/Gapoktan sesuai kewenangan.

- Kewenangan Provinsi disampaikan pada Ditjen Bina Bangda, Dinas PU SDA Prov, Bappeda Prov/kab, Dinas Pertanian Prov/kab dan P3A/GP3A/IP3A atau Poktan/Gapoktan sesuai kewenangan.
- Kewenangan Kabupaten disampaikan pada Ditjen Bina Bangda, Dinas PU SDA Kab, Dinas pertanian Kab dan P3A/GP3A/IP3A atau Poktan/Gapoktan sesuai kewenangan.

Laporan harus segera disampaikan kepada semua pihak paling lambat 3 hari sesudah penyusunan laporan selesai dan dalam Kata Pengantar Laporan PSETK telah resmi ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan (sesuai kewenangannya) bukan oleh TPM/KTPM atau pihak lainnya.

BAB V EVALUASI DAN PEMBARUAN DOKUMEN PSETK

V.1 Evaluasi Pelaksanaan

Pemantauan (monitoring) dan evaluasi (Monev) merupakan bagian pengelolaan program, baik fisik maupun non fisik. Prinsip monev adalah kontrol terhadap suatu kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

V.1.1. Tolok Ukur

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyusunan PSETK, tolok ukur yang menjadi acuan dalam menentukan baik atau tidaknya proses tersebut dapat dilihat dari:

- a. Adanya keterlibatan masyarakat petani baik laki-laki maupun perempuan dan pihak berkepentingan lainnya dalam penyusunan PSETK
- b. Ada rencana kerja tahunan dan berkala pada berbagai tingkat pengelola irigasi-pertanian,
- c. Realisasi rencana kerja tahunan dan berkala pada berbagai tingkat pengelolaan irigasi-pertanian
- d. Tersusunnya redefinisi tugas antar lembaga pengelolaan irigasi-pertanian di tingkat Daerah Irigasi-pertanian,
- e. Tersedianya data teknis Jaringan Irigasi-pertanian, berupa skema Jaringan Irigasi-pertanian beserta kondisinya.

V.1.2. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi

Untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proses Pelaksanaan PSETK diperlukan organisasi yang jelas yang dapat mendukung keberhasilan sesuai yang telah direncanakan, dalam hal ini disesuaikan dengan perundangan/peraturan yang berlaku (Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) terkait dengan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

V.1.3. Monitoring dan Evaluasi

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Monev Pelaksanaan PSETK adalah:

- **Tahap persiapan**, untuk memantau apakah persiapan kegiatan PSETK dengan metode PPKDI telah sesuai dengan rencana (seperti pembentukan tim, susunan yang representatif, pembagian tugas yang jelas, dan lain-lain).
- **Tahap Pelaksanaan**, untuk memantau pelaksanaan kegiatan PSETK dengan metode PPKDI sesuai rencana (apakah setiap anggota tim telah bekerja dengan baik, kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan cara pemecahannya, dan lain-lain).
- **Tahap Penyusunan Laporan**, untuk memantau hasil keluaran pelaksanaan kegiatan PSETK metode PPKDI sesuai dengan sasaran semula, yang dituangkan dalam suatu laporan kegiatan.

b. *Tata Cara Monev*

Tata cara Monev Pelaksanaan PSETK adalah sebagai berikut :

- Review Laporan untuk menelaah data dan informasi pelaksanaan PSETK
- Kunjungan Lapangan untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci. Kegiatan ini dilakukan secara berkala atau insidental sesuai kebutuhan.
- Forum Koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan /atau kunjungan lapangan

Kegiatan monev partisipatif yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PSETK dengan metode PPKDI adalah sangat terbuka dan disesuaikan dengan daerah masing-masing sehingga kemungkinan terjadi format-format yang bervariasi tergantung kapasitas dan tujuan serta kebutuhan setempat.

c. *Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut*

Hasil dari monev disampaikan kepada pelaksana kegiatan sebagai umpan balik untuk ditindak lanjuti. Rekomendasi diberikan kepada pelaksanaan kegiatan untuk dapat digunakan sebagai bahan perbaikan. Rencana tindak lanjut dibuat untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sudah ditetapkan.

V.2 Pembaharuan PSETK

Data yang telah disusun dalam buku laporan PSETK dapat digunakan oleh para pengguna PSETK mulai dari Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan, Komir, Dinas terkait dengan irigasi-pertanian, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Oleh karena itu, tingkat validitas dan kekinian data menjadi penting bagi data PSETK.

Pembaharuan PSETK perlu dilakukan mengingat: (1) ketersediaan data harus sepanjang waktu dengan tingkat validitas tinggi, (2) data dan informasi di tingkat Daerah Irigasi-pertanian yang ada bersifat dinamis, (3) sebagai evaluasi untuk validitas data dan informasi terdahulu, dan (4). penambahan dan penyesuaian indikator yang terdapat pada formulir isian PSETK berdasarkan hasil evaluasi.

Waktu pembaharuan PSETK sebaiknya dilakukan pada kurun tertentu minimal 2 (dua) tahun setelah ditetapkan, tetapi hal ini tergantung langkah awal kapan mulai dilakukan proses pengumpulan data melalui metode PPKDI atau metode lainnya. Untuk waktu pelaksanaan pembaharuan data disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah Irigasi dan kebutuhan data dan informasi masyarakat petani, dinas instansi terkait irigasi pertanian dan pihak lainnya.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk kegiatan pembaharuan data PSETK adalah:

- a. Memeriksa dan mengevaluasi data dalam PSETK mana saja yang dianggap sudah kurang sesuai kondisi saat ini.
- b. Memeriksa indikator-indikator pada formulir PSETK yang ada untuk kemudian dilakukan penyesuaian dengan kondisi pada saat akan dilakukan updating data.
- c. Melakukan koordinasi antar OPD dan atau dinas terkait dengan pengelolaan irigasi-pertanian, komisi Irigasi-pertanian dengan melibatkan masyarakat petani Daerah Irigasi, dan TPM/KTPM.
- d. Merencanakan persiapan kegiatan pembaharuan PSETK
- e. Melaksanakan kegiatan pembaharuan PSETK dengan pendekatan partisipatif
- f. Menyusun Profil SETK hasil pembaharuan PSETK
- g. Membuat laporan kegiatan pembaharuan PSETK
- h. Mensosialisasikan hasil PSETK pada rapat anggota P3A/GP3A/IP3A.

BAB VI PEMBIAYAAN KEGIATAN PSETK

VI.1 Sumber Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan penyusunan PSETK melalui metode PPKDI didanai dari sumber yang sah baik Loan/Grant, APBN, APBD, organisasi P3A/GP3A/IP3A, sumber pendanaan lain atau gabungan dari keempat sumber pembiayaan tersebut dan dikeluarkan sesuai dengan Daerah Irigasi kewenangannya.

Besaran pendanaan kegiatan tersebut direncanakan secara matang sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.²

VI.2 Kebutuhan Pembiayaan

Kebutuhan biaya yang harus disediakan dalam rangka PSETK adalah sbb :

1. Biaya untuk **Pelatihan** PSETK.
2. Biaya untuk **Penyusunan** PSETK.

Pelatihan PSETK dilaksanakan sesuai kebutuhan masing – masing daerah, namun harus juga memperhitungkan efektifitas dan efisiensi Pelatihan tersebut (\pm 3 - 4 hari) termasuk 1 hari untuk praktek ke lapangan. Biaya yang harus disediakan adalah sbb:

1. Honor Nara Sumber.
 2. Honor Moderator
 3. Honor Penyelenggara
 4. Uang saku/Transport peserta pelatihan
 5. Sewa tempat/ruang
 6. Perlengkapan pertemuan (ATK, foto copy dll)
 7. Dokumentasi
 8. Konsumsi
 9. Peralatan (Kompas, meteran dll)
 10. Pelaporan (Penggandaan Materi)
- } Sesuai lama pelaksanaan

Penyusunan PSETK dilaksanakan dengan 2 tahapan sbb:

a. Persiapan Kegiatan.

Biaya untuk persiapan kegiatan dibutuhkan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dimana pelaksanaan tersebut akan dilakukan pembentukan Tim, analisa kebutuhan dan rencana pelaksanaan. Biaya-biaya yang diperlukan antara lain untuk :

1. Uang saku peserta

² Besaran pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat daerah serta menggunakan SBU masing masing daerah

2. Dokumentasi
3. Konsumsi
4. ATK

b. Pelaksanaan Kegiatan.

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan PSETK dilakukan sesuai dengan urutan kegiatan seperti : i).pertemuan di tingkat DI, dimana disana akan dijelaskan terkait dengan form dan pengumpulan data-data yang diperlukan ; ii). Penelusuran jaringan ; iii) FGD dimana disana akan dibahas gagasan-gagasan terkait hasil penelusuran jaringan. Biaya yang diperlukan harus disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah masing-masing (tergantung luasan DI yang akan di PSETK) sedikitnya adalah sebagai berikut:

1. Honor ketua Tim/Koordinator
2. Uang saku peserta
3. Dokumentasi
4. Konsumsi
5. ATK

c. Penyusunan Laporan

Pada tahap penyusunan laporan Dokumen PSETK terdiri dari kegiatan i) Verifikasi hasil data hasil pelaksanaan PSETK; ii) Konsolidasi hasil PSETK; iii) Penyusunan Laporan; dan iv) Finalisasi Laporan. Biaya yang dibutuhkan pada kegiatan penyusunan laporan sedikitnya adalah sebagai berikut:

1. Uang saku peserta
2. Dokumentasi
3. Konsumsi
4. ATK
5. Penggandaan dokumen PSETK

BAB VII PENUTUP

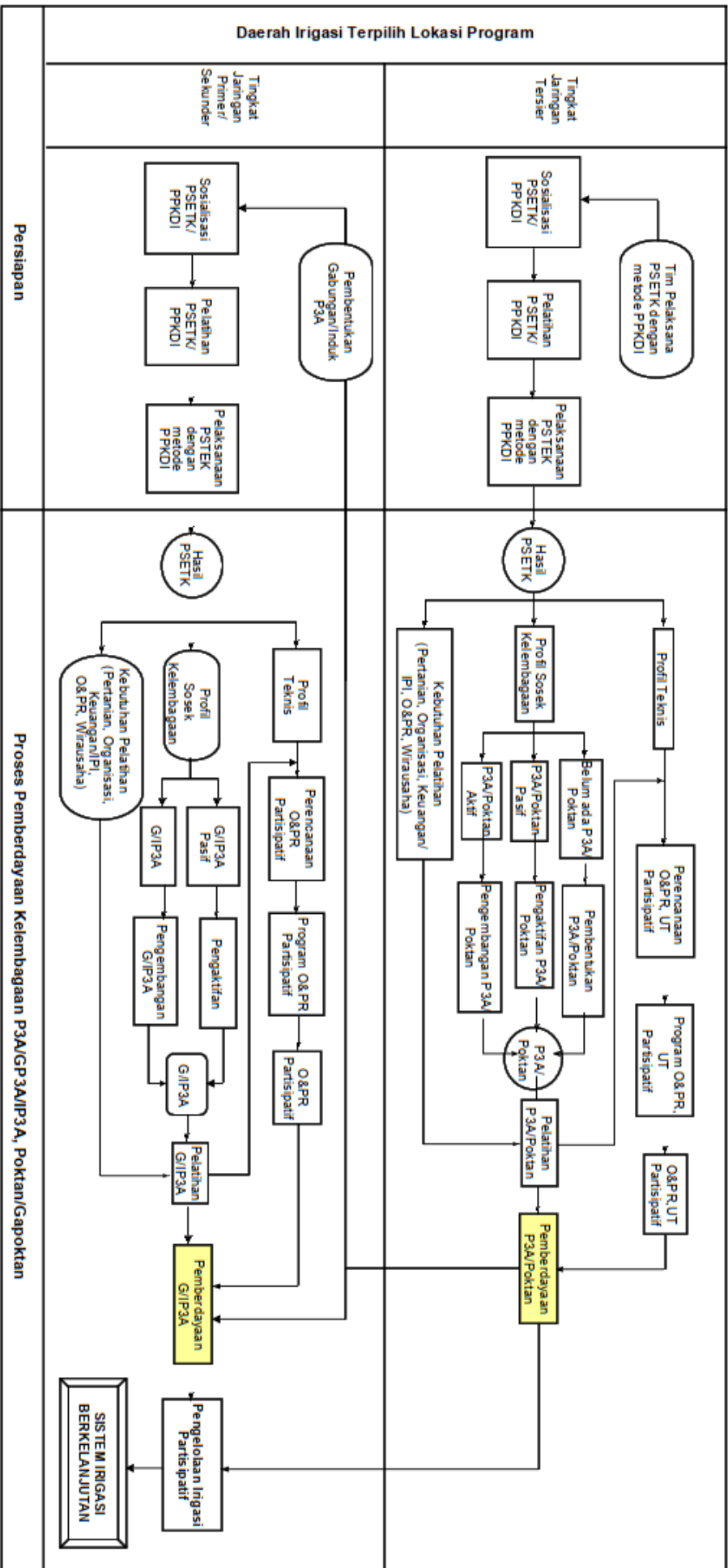
Pelaksanaan PSETK dengan metode PPKDI memberikan data dan informasi yang aktual sesuai kondisi di lapangan pada suatu daerah irigasi-pertanian sebagai acuan untuk penyusunan rencana program kegiatan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif. Penerapan metode PPKDI dalam pelaksanaan kegiatan PSETK tidak bersifat kaku dan dapat dikembangkan lagi dalam penggalian data dan informasi dari masyarakat petani pemakai air sehingga diperoleh hasil yang optimal. Panduan ini bersifat referensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan masing-masing daerah dengan memperhatikan pencapaian tujuan utamanya, yaitu pemberdayaan kelembagaan petani Daerah Irigasi melalui P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar lampiran

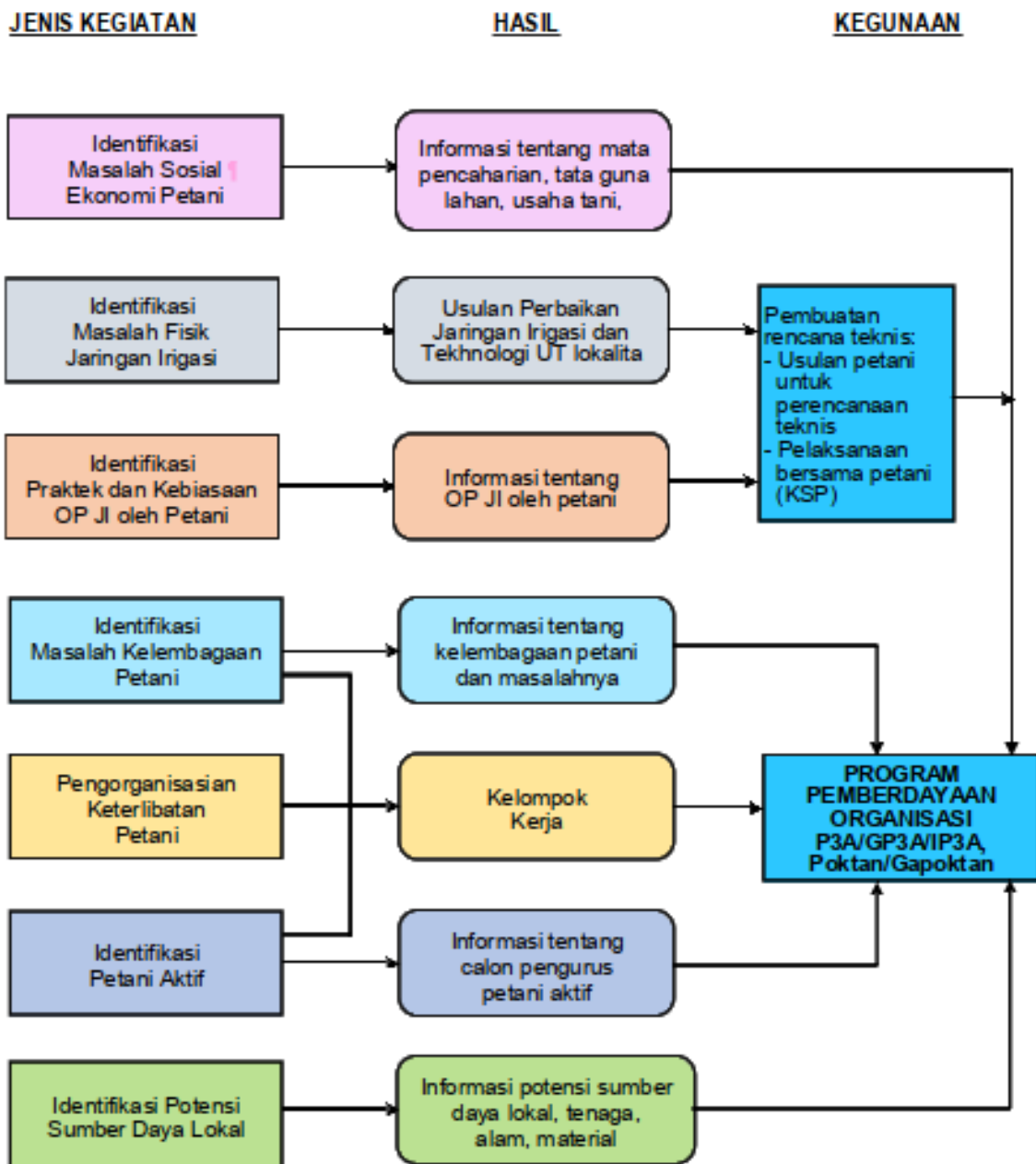
1. Bagan Alir PSETK Dalam Rangka PPSIP untuk Program Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan dalam Pengelolaan Irigasi Partisipatif
2. Kegiatan Penyusunan PSETK Dalam Rangka PPSI
3. Proses PSETK Dalam Rangka PPSI
4. Hasil PSETK Dalam Rangka PPSI
5. Formulir Isian Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK)
6. Form Pola dan Jadwal Tanam & Analisis Usaha Tani
7. Formulir Rekapitulasi Permasalahan
8. Form Pertanyaan Pentapisan Sosial dan Lingkungan
9. Daftar Hadir Peserta Pertemuan
10. Form Foto Dokumentasi Pelaksanaan PSETK
11. Struktur Organisasi P3A/ GP3A/IP3A dan Poktan/ Gapoktan
12. Form Berita Acara Hasil Pertemuan Awal Kegiatan Penyusunan PSETK
13. Berita Acara Pembahasan Hasil PSETK
14. Berita Acara Penyusunan PSETK
15. Form Daftar List Lampiran Laporan PSETK
16. Sistematika Laporan PSETK
17. Instrumen Penilaian PSETK

Lampiran 1. Bagan Alir PSETK Dalam Rangka PPSIP untuk Program Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A/PP3A, Poktan/Gapoktan dalam Pengelolaan Irigasi Partisipatif

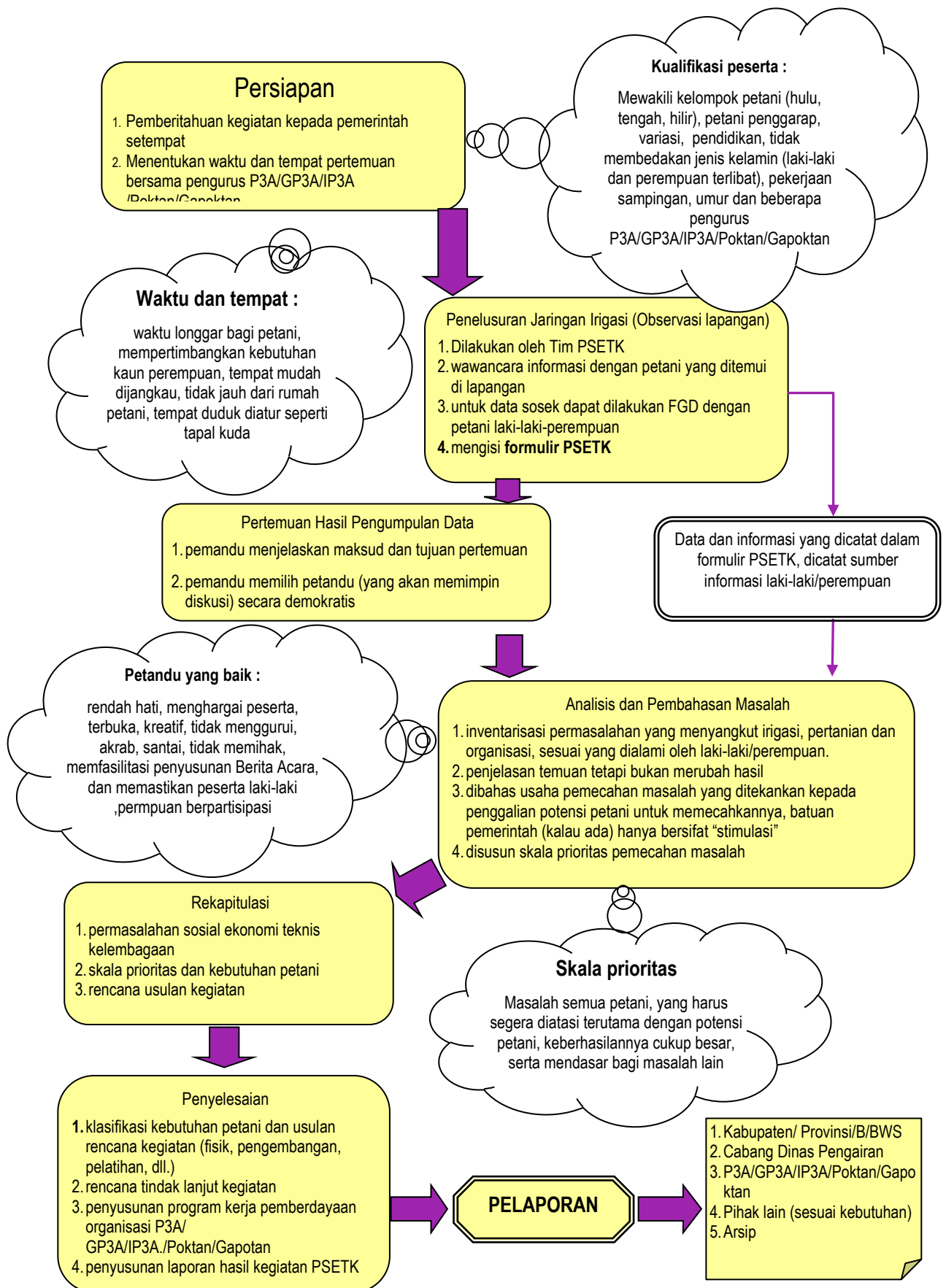


Catatan:
 1. Pembentukan P3A/GP3A/PP3A dilaksanakan oleh dinas SDA
 2. Pembentukan Poktan/Gapoktan dilaksanakan oleh dinas Pertanian melalui PPL

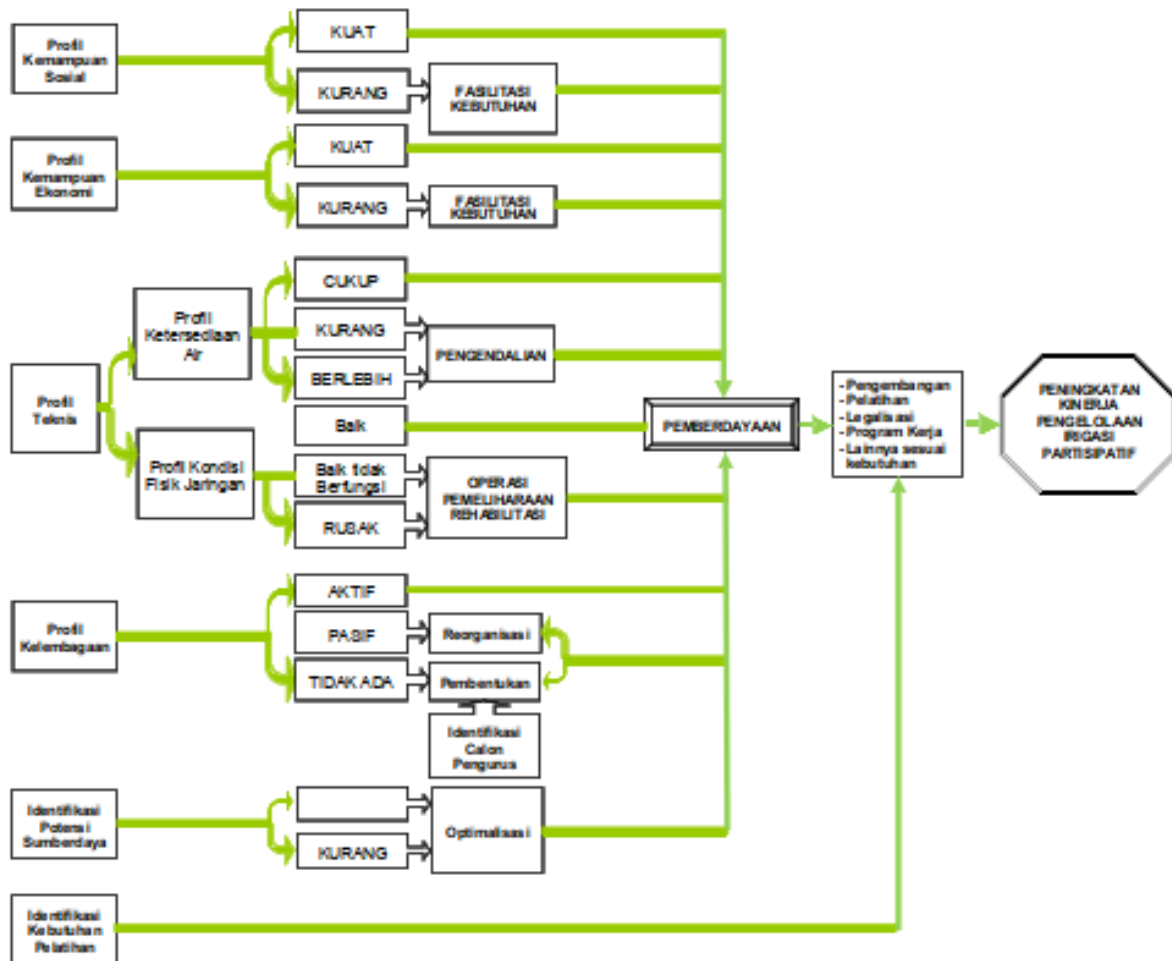
Lampiran 2 Kegiatan Penyusunan PSETK Dalam Rangka PPSI



Lampiran 3. Proses PSETK Dalam Rangka PPSI



Lampiran 4. Hasil PSETK Dalam Rangka PPSI



DAERAH IRIGASI (DI)

I. PROFIL UMUM DAERAH IRIGASI

A. Kondisi Umum

- Nama Propinsi :
- Nama Kab./Kota :
- Nama Kecamatan :
- Nama Daerah Irigasi :
- Kewenangan Pengelolaan:
- Operasional :
- Pemeliharaan:
- Rehabilitasi :
- Nama Kantor Pengelola:
- Luas Areal Baku (ha):Ha
- Nama Sumber Air:
- Sumber Air/Suplesi 1:
- Sumber Air/Suplesi 2:
- Sumber Air/Suplesi 3:
- Sumber Air/Suplesi 4:
- Sumber Air/Suplesi 5:
- Nama Sungai:
- Lokasi Bendung / Bangunan Pengambil (Detail):
- Posisi DI dalam wilayah sungai: Hulu Tengah Hilir
- Nama DI lainnya Sepanjang Sungai :
- Hulu DI ini : 1. 2. 3. 4.
(sebutkan berurutan)
- Hilir DI ini : 1. 2. 3. 4.
(sebutkan berurutan)
- Lokasi Pelayanan DI :
- 1. Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
- 2. Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
- 3. Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
- 4. Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
- 5. Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
- dst...
- Posisi dalam Wilayah Satu Saluran Sekunder Hulu Tengah Hilir
- Nama Saluran Sekunder lainnya :
- Hulu SS ini : 1. 2. 3. 4.
(sebutkan berurutan)
- Middle SS ini : 1. 2. 3. 4.
(sebutkan berurutan)
- Hilir SS ini : 1. 2. 3. 4.
(sebutkan berurutan)

- Nama Desa :desa
- Luas Potensial:Ha
- Luas Fungsional:Ha
- Jumlah P3A :unit
- Jumlah GP3A :unit
- Jumlah IP3A :unit
- Jumlah Poktan :unit
- Jumlah Gapoktan :unit
- Jumlah Petani :orang
- L :org ...% P :org ...%
- Waktu Survei
- Musim Tanam (MT): (MT I) - (MT II) - (MT III)
- Tgl. Pelaksanaan :

- Lokasi Pelayanan SS :

1 Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
 2 Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
 3 Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
 4 Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
 5 Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
 6 Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
 7 Desa : Kecamatan : Luas Areal : Ha
 dst..

B Keadaan Sumber, Ketersediaan, dan Alokasi Air Irigasi

1. Sumber Air Irigasi

a. Sumber utama air irigasi

- Sumber air utama : Tidak ada Ada

Jika ada, jenis sumber air utama :

Sungai Waduk Situ Embung Lainnya: _____
 (sebutkan nama sumber air utama tersebut)

b. Sumber air penunjang (suplesi)

- Sumber air suplesi : Tidak ada Ada

Jika ada, jenis sumber air penunjang (suplesi) :

Air tanah Mela air Sungai Drainase Lainnya: _____
 (sebutkan nama sumber air suplesi tersebut)

2. Ketersediaan Air Irigasi

a. Ketersediaan air di sumber air sepanjang tahun.

No	Bulan	Periode	Q Sumber(m ³ /det)	Q intake rencana M ³ /Det	Q intake realisasi M ³ /det	% Real/Rencana	Keterangan
1	A	1					
		2					
		3					
2	B	1					
		2					
		3					
3	C	1					
		2					
		3					
4	D	1					
		2					
		3					
Dst							

Catatan : Data ini diisi pada saat survey dan informasi tambahan bulan lalu, terutama bagi DI yang mempunyai Bangunan Ukur

b. Kehilangan Air

80%-90% 40%-60% 30%-40% 10%-30%

c. Produktifitas Air

0,5 kg GKG/m³ air 0,6-0,7 kg GKG/m³ air 0,8-0,10 kg GKG/m³ air

d. Kondisi dan Kualitas Air

- Potensi sumber air utama :

MT - I
B C K

Kondisi Air
MT - II
B C K

MT - III
B C K

Kondisi
Kualitas Air
Tc Ttc

- Potensi sumber air penunjang :

MT - I
B C K

MT - II
B C K

MT - III
B C K

Tc
Ttc

e. Ketersediaan dan kualitas air di jaringan irigasi sepanjang tahun.

- Potensi air irigasi di jaringan :

MT-I
B C K

MT-II
B C K

MT-III
B C K

Tc	TTc
----	-----

- Potensi air irigasi di hulu jaring :

MT-I
B C K

MT-II
B C K

MT-III
B C K

Tc	TTc
----	-----

- Potensi air irigasi di tengah jaring :

MT-I
B C K

MT-II
B C K

MT-III
B C K

Tc	TTc
----	-----

- Potensi air irigasi di hilir jaring :

MT-I
B C K

MT-II
B C K

MT-III
B C K

Tc	TTc
----	-----

Keterangan: B = Berlebih C = Cukup K = Kurang
Tc = Tercemar TTc = Tidak Tercemar

f. Pengambilan air irigasi dari sumber :

MT-I
mudah/sulit

MT-II
mudah/sulit

MT-III
mudah/sulit

3. Alokasi Penggunaan Air Irigasi

Domestik Perikanan Industri Kolem Lainnya: _____

4. Pola Tanam (beri tanda silang dalam kotak)

Padi - Padi - Padi Padi - Padi - P - Pw-Pw Padi - Padi Padi - Pelawija Padi

5. Indeks Pertanaman

Padi : Jaqung : Kedele :

I PROFIL SOSIAL EKONOMI

1. Status Petani

a. Status petani dalam kegiatan usahatani

Pemilik :org% Penggarap :org% Sewa :org%
 L :org P :org L :org P :org L :org P :org
 Luas Lahan Rata-rata : Ha Luas Lahan Rata-rata : Ha Luas Lahan Rata-rata : Ha

Pemilik Penggarap :org Lainnya :org%
 L :org P :org L :org P :org
 Luas Lahan Rata-rata : Ha Luas Lahan Rata-rata : Ha Luas Lahan Rata-rata : Ha

b. Rata-rata luas kepemilikan lahan p : ha/orang

2. Struktur mata pencaharian penduduk sekitar daerah irigasi

a. Mata pencaharian masyarakat yang mendapat pelayanan air irigasi

Petani :org% Pedagang :org% Pegawai :org%
 L :org P :org L :org P :org L :org P :org
 Buruh industri :% Lainnya :%
 L :org P :org L :org P :org

b. Struktur pendapatan rumah tangga masyarakat petani pemakai air

Pertanian :% Non Pertanian :% Pertanian dan non pertanian :%

c. Rata-rata pendapatan rumah tangga masyarakat petani pemakai air dalam sebulan

Pertanian : Rp/bln Non Pertanian : Rp/bln
 Pertanian dan non pertanian : Rp/bln

3. Tingkat pendidikan masyarakat petani pemakai air

a. Pendidikan terakhir masyarakat petani pemakai air

SD :org% SMP :org% SMA :org%
 L :org P :org L :org P :org L :org P :org
 Sarjana :org% Lainnya :org%
 L :org P :org L :org P :org

- b. Struktur usia produktif rumah tangga masyarakat petani pemakai air
 0 - 17 thn :org% 18 - 50 thn :org% > 50 thn :org%
4. Hubungan kemasyarakatan
- a. Gotong royong : Baik Cukup Kurang
- b. Hubungan petani hulu-tengah-hilir jaringan irigasi Baik Cukup Kurang
- c. Hubungan antarpetani di hulu jaringan irigasi Baik Cukup Kurang
- d. Hubungan antarpetani di tengah jaringan irigasi Baik Cukup Kurang
- e. Hubungan antarpetani di hilir jaringan irigasi Baik Cukup Kurang
5. Budaya Masyarakat petani pemakai air
- a. Kebiasaan masyarakat petani pemakai air setelah panen Ada Tidak ada
- Sebutkan jenis kebiasaannya (jika :)
- b. Kebiasaan masyarakat petani pemakai air berkaitan dengan air dan jaringan irigasi Ada Tidak ada
- Sebutkan jenis kebiasaannya (jika :)
6. Potensi sumberdaya lokal yang tersedia pada di sekitar daerah irigasi
- a. Sumberdaya manusia (tenaga kerja) Potensial Cukup Kurang
- b. Sumberdaya lahan Potensial Cukup Kurang
- c. Sumberdaya air Potensial Cukup Kurang
- d. Sumberdaya material Potensial Cukup Kurang
- e. Sumberdaya teknologi Potensial Cukup Kurang
- f. Sumberdaya lainnya (sebutkan:.....) Potensial Cukup Kurang
7. Peluang usaha ekonomi produktif
- a. Berbasis air Potensial Cukup Kurang
- b. Berbasis lahan Potensial Cukup Kurang
- c. Berbasis teknologi Potensial Cukup Kurang
- d. Agribisnis Potensial Cukup Kurang
- e. Diversifikasi usaha Potensial Cukup Kurang
- d. Lainnya (sebutkan:.....) Potensial Cukup Kurang
8. Swadaya masyarakat petani pemakai air
- a. Swadaya Potensial Cukup Kurang
- b. Swadana Potensial Cukup Kurang
- c. Swakelola Potensial Cukup Kurang

III. PROFIL TEKNIK

1. Kondisi fisik dan fungsi jaringan irigasi

Jenis Jaringan Irigasi	Jarak dan Rendahnya	Jumlah	Kondisi				Fungsi				Mempengaruhi Aliran Air			
			B	RR	RS	RB	B	K	Br	TB	Ya	Tidak		
<input type="checkbox"/> Bendung													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Pompa													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Bg. Pengambilan bebas													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Alat Ukur Debit													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Kantong Lumpur													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Pel Scheel													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Sipon													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Bg. Bagi													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Bg. Sadep													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Bg. Bagi/Sadep													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Bg. Pengatur													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Bg. Tejun													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Bg. Pelimpah/Pengurus													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Talang													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Lining													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Jembatan													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Terowongan													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Gorong-gorong													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Papan pengamanan													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Sal. Induk													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Sal. Sekunder													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Sal. Tersier													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Sal. Pembuang													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Sal. Tanah													Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Lainnya : (Fasilitas OP)													Ya	Tidak

Keterangan:

Kondisi B Baik RR Rusak Ringan RS Rusak Sedang RB Rusak Berat
 Fungsi B Baik K Kurang Br Buruk TB Tidak Berfungsi

2. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi

a. Aspek Kegiatan Operasi

- Perencanaan tata tanam dan pembagian air (RTT dan RPA) pada setiap Musim Tanam (MT)

	Rencana Tata Tanam (RTT)		Rencana Pembagian Air (RPA)	
MT - I	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
MT - II	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
MT - III	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada

Pihak yang menyusun RTT dan RPA pada Di setempat (jika ada)

P3A/GP3A/IP3A bersama Pokdani/KCD/KPL/Dinas P3A/GP3A/IP3A dan KCD/KPL/Dinas

- Kesesuaian realisasi RTT dan RPA dengan rencana yang ditetapkan

RTT	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai
RPA	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai

- Pelaksanaan teknis pembagian air
 - Petugas Pemerintah Daerah (KCD/Dinas/mentri/urur, dll.)
 - Petugas Pemerintah bersama P3A/GP3A/IP3A
 - Petugas dari P3A/GP3A/IP3A
 - Ketepatan pelaksanaan pengaturan pembagian air pada DI setempat
 - Tepat Waktu Tidak tepat waktu
 - Tepat Jumlah Tidak tepat jumlah
 - Tepat kualitas Tidak tepat kualitas
 - Pelayanan kegiatan pengaturan operasi jaringan irigasi
 - Memuaskan Cukup memuaskan Kurang memuaskan
 - Keterlibatan GP3A/IP3A dalam kegiatan operasi jaringan irigasi
 - Tidak ada Ada
 - Kemampuan petugas pelaksana dari GP3A/IP3A (jika ada)
 - Menutup dan membuka pintu air di bendung Tidak Mampu Mampu Kurang mampu
 - Menutup dan membuka pintu air di jaringan Tidak Mampu Mampu Kurang mampu
 - Penghitungan debit air di bendung Tidak Mampu Mampu Kurang mampu
 - Penghitungan debit air di jaringan Tidak Mampu Mampu Kurang mampu
 - Pembagian air sesuai aturan Tidak Mampu Mampu Kurang mampu
 - Koordinasi pengaturan air antar pengguna air pada DI setempat
 - Tidak ada Ada
 - Konflik permasalahan berkaitan dengan kegiatan operasi jaringan irigasi
 - Tidak ada Ada
 - Konflik permasalahan berkaitan dengan kegiatan operasi jaringan irigasi
 - Hulu Tidak ada Ada
 - Mide Tidak ada Ada
 - Hilir Tidak ada Ada
 - Jenis konflik yang terjadi dan berapa kali intensitasnya dalam setahun (jika ada)

Jenis konflik :	Intensitas konflik:
<input type="checkbox"/> Perencanaan Tata Tanam (RTT)	<input type="checkbox"/> _____ x
<input type="checkbox"/> Perencanaan Pembagian Air (RPA)	<input type="checkbox"/> _____ x
<input type="checkbox"/> Pengaturan/giliran/pembagian air antar petani	<input type="checkbox"/> _____ x
<input type="checkbox"/> Pengaturan/giliran/pembagian air antara petani dengan industri	<input type="checkbox"/> _____ x
<input type="checkbox"/> Pengaturan/giliran/pembagian air antara petani dengan PDAM	<input type="checkbox"/> _____ x
<input type="checkbox"/> Pengaturan/giliran/pembagian air antara petani dengan rumah tangga	<input type="checkbox"/> _____ x
<input type="checkbox"/> Pengaturan/giliran/pembagian air antara petani dengan Pemerintah	<input type="checkbox"/> _____ x
- b. Aspek Kegiatan Pemeliharaan**
- Perencanaan kegiatan pemeliharaan pada DI setempat
 - Tidak ada Ada
 - Waktu penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan tersebut (jika ada)
 - Tahunan Musiman: () MT - I () MT - II () MT - III
 - Pihak yang menyusun rencana kegiatan pemeliharaan tersebut
 - P3A/GP3A/IP3A P3A/GP3A/IP3A bersama KCD/KPL/Dinas BBWS/BWS/KCD/KPL/Dinas

- Informasi Hasil Desain dituangkan dalam berita acara

BBWS/BWS	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
Masyarakat Desa	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
GP3A/P3A/IP3A/Poktan/Gepoktan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada

e. Aspek Kegiatan Konstruksi Partisipatif

- Keterlibatan dalam Persiapan Konstruksi, seperti Sosialisasi tentang Penjelasan Rencana Konstruksi

- | | | |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Masyarakat Sempat | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| GP3A/P3A/IP3A | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| Dinas | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |

- Keterlibatan GP3A/IP3A/P3A Dalam konstruksi Primer/Sekunder (KSO)

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| Penyediaan Bahan/Material | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| Penyediaan Tenaga Kerja | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| Penyediaan Tenaga Kerja & Material/Bahan | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |

- Jenis Pekerjaan yang dikerjasamakan (KSO)

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Galian/Timbunan | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| Pasangan Batu Lining | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| Penyediaan Semen Pasir Kerikil | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |

- Pembuatan Nota Kesepakatan (Perjanjian Kerja) Pekerjaan Konstruksi

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| BBWS/BWS dengan IP3A/GP3A/P3A | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| BBWS/BWS dengan Masyarakat Sempat | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| BBWS/BWS Dinas PSDA Provinsi/Kabupaten | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |

- Keterlibatan Pengawasan dalam Pelaksanaan Konstruksi

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| IP3A/GP3A/P3A | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| Masyarakat Sempat | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| BBWS/BWS/Dinas PSDA Provinsi/Kabupaten | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |

IV. PROFIL KELEMBAGAAN

1. Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A (jika data terlalu banyak, dapat dibuat list tersendiri sebagai lampiran)

Apabila sudah ada P3A/GP3A/IP3A, isilah data berikut sesuai kondisi saat survey

a. P3A

- | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. P3A..... | Luas:..... | Desa :..... | Kecamatan :..... |
| Jumlah Pengurus :.....org <input type="checkbox"/> L | :.....org <input type="checkbox"/> P | :.....org | Jumlah anggota :.....org |
| 2. P3A..... | Luas:..... | Desa :..... | Kecamatan :..... |
| Jumlah Pengurus :.....org <input type="checkbox"/> L | :.....org <input type="checkbox"/> P | :.....org | Jumlah anggota :.....org |
| 3. P3A..... | Luas:..... | Desa :..... | Kecamatan :..... |
| Jumlah Pengurus :.....org <input type="checkbox"/> L | :.....org <input type="checkbox"/> P | :.....org | Jumlah anggota :.....org |
| 4. P3A..... | Luas:..... | Desa :..... | Kecamatan :..... |
| Jumlah Pengurus :.....org <input type="checkbox"/> L | :.....org <input type="checkbox"/> P | :.....org | Jumlah anggota :.....org |
| 5. P3A..... | Luas:..... | Desa :..... | Kecamatan :..... |
| Jumlah Pengurus :.....org <input type="checkbox"/> L | :.....org <input type="checkbox"/> P | :.....org | Jumlah anggota :.....org |

Dat

b GP3A

- Nama GP3A. 1 :
 - Panjang Saluran : M
 - Nama Saluran :
 - Luas Areal : Ha
 - Jumlah Pengurus :org :org :org Jumlah anggota :P3A
 - Nama-Nama P3A anggota GP3A tersebut:
 - 1. P3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 2. P3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 3. P3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 4. P3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 5. P3A Ha Desa : Kecamatan :
 - Dst
- Nama GP3A. 2 :
 - Panjang Saluran : M
 - Nama Saluran :
 - Luas Areal : Ha
 - Jumlah Pengurus :org :org :org Jumlah anggota :P3A
 - Nama-Nama P3A anggota GP3A tersebut:
 - 1. P3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 2. P3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 3. P3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 4. P3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 5. P3A Ha Desa : Kecamatan :
 - Dst
- Nama GP3A ...dst

c P3A

- Nama IP3A. 1 :
 - Panjang Saluran : M
 - Nama Saluran :
 - Luas Areal : Ha
 - Jumlah Pengurus :org :org :org Jumlah anggota :GP3A
 - Nama-Nama GP3A anggota IP3A tersebut:
 - 1. GP3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 2. GP3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 3. GP3A Ha Desa : Kecamatan :
 - dst.
- Nama IP3A. 2 :
 - Panjang Saluran : M
 - Nama Saluran :
 - Luas Areal : Ha
 - Jumlah Pengurus :org :org :org Jumlah anggota :GP3A
 - Nama-Nama GP3A anggota IP3A tersebut:
 - 1. GP3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 2. GP3A Ha Desa : Kecamatan :
 - 3. GP3A Ha Desa : Kecamatan :
 - dst.

2. Kelembagaan Poktan/Gapoktan (apabila data terlalu banyak, dapat dibuat list tersendiri, sebagai lampiran)

a. Poktan

1 Poktan	J Orang	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
2 Poktan	J Orang	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
3 Poktan	J Orang	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
4 Poktan	J Orang	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
5 Poktan	J Orang	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
6 Poktan	J Orang	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
7 Poktan	J Orang	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
8 Poktan	J Orang	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
9 Poktan	J Orang	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
10 Poktan	J Orang	Jenis Usaha :	Luas :	Ha

dst

b. Gapoktan

1 Gapoktan	J Poktan	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
2 Gapoktan	Anggota:	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
3 Gapoktan	Anggota:	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
4 Gapoktan	Anggota:	Jenis Usaha :	Luas :	Ha
5 Gapoktan	Anggota:	Jenis Usaha :	Luas :	Ha

6 dst....

a. Pembentukan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan pada Di setempat

- P3A	<input type="checkbox"/> Musyawarah	<input type="checkbox"/> Voting	<input type="checkbox"/> Penunjukan langsung oleh Camat/KCD/Dinas/Desa, dll.
- GP3A	<input type="checkbox"/> Musyawarah	<input type="checkbox"/> Voting	<input type="checkbox"/> Penunjukan langsung oleh Camat/KCD/Dinas/Desa, dll.
- IP3A	<input type="checkbox"/> Musyawarah	<input type="checkbox"/> Voting	<input type="checkbox"/> Penunjukan langsung oleh Camat/KCD/Dinas/Desa, dll.
- Poktan	<input type="checkbox"/> Musyawarah	<input type="checkbox"/> Voting	<input type="checkbox"/> Penunjukan langsung oleh Camat/KCD/Dinas/Desa, dll.
- Gapoktan	<input type="checkbox"/> Musyawarah	<input type="checkbox"/> Voting	<input type="checkbox"/> Penunjukan langsung oleh Camat/KCD/Dinas/Desa, dll.

b. ADIART kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan

- P3A	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada	- Poktan	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada
- GP3A	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada	- Gapoktan	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada
- IP3A	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada			

c. Proses penyusunan ADIART kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan (jika sudah ada)

- Disusun oleh pengurus P3A
- Disusun oleh pengurus GP3A/IP3A
- Disusun oleh pengurus P3A/GP3A/IP3A bersama BBWS/BWS/Dinas Prov/ Kabupaten/KP/UT/PR/PT/LSM
- Disusun oleh pengurus Poktan/Gapoktan
- Disusun Bersama oleh KP/PP/LLSM
- Disusun oleh PPL

d. Realisasi pelaksanaan ADIART Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan sesuai ketetapan

- P3A	<input type="checkbox"/> < 25% sesuai	<input type="checkbox"/> 25% - 50%	<input type="checkbox"/> 51% - 75%	<input type="checkbox"/> 76% - 100%
- GP3A	<input type="checkbox"/> < 25% sesuai	<input type="checkbox"/> 25% - 50%	<input type="checkbox"/> 51% - 75%	<input type="checkbox"/> 76% - 100%
- IP3A	<input type="checkbox"/> < 25% sesuai	<input type="checkbox"/> 25% - 50%	<input type="checkbox"/> 51% - 75%	<input type="checkbox"/> 76% - 100%
- Poktan	<input type="checkbox"/> < 25% sesuai	<input type="checkbox"/> 25% - 50%	<input type="checkbox"/> 51% - 75%	<input type="checkbox"/> 76% - 100%
- Gapoktan	<input type="checkbox"/> < 25% sesuai	<input type="checkbox"/> 25% - 50%	<input type="checkbox"/> 51% - 75%	<input type="checkbox"/> 76% - 100%

e. Status legalitas badan hukum Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan

- P3A	<input type="checkbox"/> Sudah,%	<input type="checkbox"/> Proses,%	<input type="checkbox"/> Belum,%
- GP3A	<input type="checkbox"/> Sudah,%	<input type="checkbox"/> Proses,%	<input type="checkbox"/> Belum,%
- IP3A	<input type="checkbox"/> Sudah,%	<input type="checkbox"/> Proses,%	<input type="checkbox"/> Belum,%
- Poktan	<input type="checkbox"/> Sudah,%	<input type="checkbox"/> Proses,%	<input type="checkbox"/> Belum,%
- Gapoktan	<input type="checkbox"/> Sudah,%	<input type="checkbox"/> Proses,%	<input type="checkbox"/> Belum,%

f. Aset sekretariat Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A : Poktan/Gepoktan

	P3A	GP3A	IP3A	Poktan	Gepoktan
- Daftar anggotalehan	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Peta wilayah kerja	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Data jaringan irigasi	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Administrasi umum	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Kantor	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Administrasi keuangan	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Rekening Bank	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- NPWP	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak

g. Gambar Struktur Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A

- P3A :

- GP3A :

- IP3A :

- Poktan

- Gepoktan

Apabila di daerah irigasi tersebut belum ada atau belum cukup, upaya yang akan dilaksanakan adalah

- a. Kebutuhan Pembentukan P3A/GP3A/IP3A
- Kebutuhan Pembentukan P3A : P3A
 - Kebutuhan Pembentukan GP : GP 3A
 - Kebutuhan Pembentukan IP3A : IP3A
- b. Kebutuhan Reorganisasi P3A/GP3A/IP3A
- Kebutuhan Reorganisasi P3A : P3A
 - Kebutuhan Reorganisasi GP3 : GP 3A
 - Kebutuhan Reorganisasi IP3A : IP3A
- c. Kebutuhan Pembentukan Poktan/Gapok
- Kebutuhan Pembentukan Pok : P3A
 - Kebutuhan Pembentukan Gap : GP 3A
- d. Kebutuhan Reorganisasi Poktan/Gapok
- Kebutuhan Reorganisasi Pok : P3A
 - Kebutuhan Reorganisasi Gap : GP 3A

2. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

- a. Fasilitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

Sudah Belum Tidak

Jika Sudah, bentuk fasilitas apa saja yang sudah diberikan ?

	P3A	GP3A	IP3A
- Pelatihan dan pelaksanaan PSETI	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Pembentukan kelembagaan	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Pengembangan Badan Hukum	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Pelatihan Kelembagaan	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Pelatihan Teknis Irigasi			
a) PPSI	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
b) Desain, Konstruksi & OP Partisi	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
c) Management Air (RTTO, RTDAR)	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Pelatihan Usahatani	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Pelatihan Ush. Ekonomi Produktif	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Pelatihan Keuangan			
a) Pelatihan Penyusunan DPI	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
b) Pelatihan Pembukaan & Penget	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Pelatihan M&E Dampak	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Kegiatan Pendampingan KPL/TPH	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Studi Bending	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Pembentukan Forum Komunikasi	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak
- Pengembangan jaringan kelemba	Ada Tidak	Ada Tidak	Ada Tidak

- b. Apakah dalam pelaksanaan fasilitas tersebut melibatkan Poktan/Gapoktan?

Ya Kadang-kadang Tidak

- c. Tingkat kemanfaatan fasilitas pemberdayaan yang diberikan tersebut

Bermanfaat Kurang Tidak bermanfaat

- d. Pengurus P3A/GP3A/IP3A selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di kabupaten/kota

- P3A	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Kadang-kadang	<input type="checkbox"/> Tidak
- GP3A	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Kadang-kadang	<input type="checkbox"/> Tidak
- IP3A	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Kadang-kadang	<input type="checkbox"/> Tidak

- e. Wawasan dan pengetahuan pengurus P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan tentang kebijakan PPSIP

- P3A	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Kurang
- GP3A	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Kurang
- IP3A	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Kurang
- Poktan	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Kurang
- Gapoktan	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Kurang

3. Kinerja Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan

a. Program kerja P3A/GP3A/IP3A

- P3A Ada Tidak ada
- GP3A Ada Tidak ada
- IP3A Ada Tidak ada
- Poktan Ada Tidak ada
- Gapoktan Ada Tidak ada

b. Penyusun program kerja Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan tersebut (jika ada)

- Pengurus P3A/GP3A/IP3A KPL/TPM Pengurus P3A/GP3A/IP3A bersama KPL/TPM
- Pengurus Poktan/Gapoktan KPL/TPM Pengurus Poktan/Gapoktan bersama KPL/TPM

c. Realisasi program kerja P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan

- P3A < 25% 25% - 50% 51% - 75% 76% - 100% (dilaksanakan)
- GP3A < 25% 25% - 50% 51% - 75% 76% - 100% (dilaksanakan)
- IP3A < 25% 25% - 50% 51% - 75% 76% - 100% (dilaksanakan)
- Poktan < 25% 25% - 50% 51% - 75% 76% - 100% (dilaksanakan)
- Gapoktan < 25% 25% - 50% 51% - 75% 76% - 100% (dilaksanakan)

d. Pertemuan/rapat kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan

- Pertemuan intern pengurus
 - Pertemuan pengurus dengan ang
 - Pertemuan pengurus dengan pih
- | | P3A | | GP3A | | IP3A | | Poktan | | | Gapoktan | | |
|--|-----|-------|------|-------|------|-------|--------|---|---|----------|---|---|
| | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak | M | C | K | M | C | K |
| | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak | M | C | K | M | C | K |
| | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak | M | C | K | M | C | K |

e. Tingkat keaktifan pengurus P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan

- P3A Aktif 100% > 50% aktif < 50% aktif Tidak aktif 100%
- GP3A Aktif 100% > 50% aktif < 50% aktif Tidak aktif 100%
- IP3A Aktif 100% > 50% aktif < 50% aktif Tidak aktif 100%
- Poktan Aktif 100% > 50% aktif < 50% aktif Tidak aktif 100%
- Gapoktan Aktif 100% > 50% aktif < 50% aktif Tidak aktif 100%

e. Kemampuan pengurus P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan dalam mengelola lembaga

- Administrasi/pembukuan
 - Penyusunan laporan
 - Pembuatan dokumen/proposal dll.
 - Pertanggungjawaban
- | | P3A | | | GP3A | | | IP3A | | | Poktan | | | Gapoktan | | |
|--|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|--------|---|---|----------|---|---|
| | M | C | K | M | C | K | M | C | K | M | C | K | M | C | K |
| | M | C | K | M | C | K | M | C | K | M | C | K | M | C | K |
| | M | C | K | M | C | K | M | C | K | M | C | K | M | C | K |
| | M | C | K | M | C | K | M | C | K | M | C | K | M | C | K |
- Keterangan: M: Mampu C: Cukup K: Kurang

f. Konflik per masalah berkaitan dengan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A dalam setahun

- Jenis konflik:
- | | P3A | | GP3A | | IP3A | | Intensitas : |
|--|-----|-------|------|-------|------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Antar pengurus | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak | _____ x |
| <input type="checkbox"/> Pengurus dengan P3A/GP3A/IP3A | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak | _____ x |
| <input type="checkbox"/> Pengurus dengan masyarakat ped | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak | _____ x |
| <input type="checkbox"/> Pengurus dengan industri, POAM, | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak | _____ x |
| <input type="checkbox"/> Pengurus dengan Dinas/KPL/TPM | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak | _____ x |

4. Aspek Pendanaan

- a. Status iuran pengelolaan irigasi pada DI setempat
- P3A Ada Tidak ada (Intensitas:x/tahun)
 - GP3A Ada Tidak ada (Intensitas:x/tahun)
 - IP3A Ada Tidak ada (Intensitas:x/tahun)

Besarnya dan bagaimana proses penentuan besaran iurannya (jika ada)

- P3A unit Muayawarah anggota petani
 Besaran : Ditetapkan langsung oleh pengurus P3A
 (____/____) Didasarkan kebutuhan pengelolaan irigasi tersier
- GP3A/IP3A Muayawarah anggota P3A unit
 Besaran : Ditetapkan langsung oleh pengurus GP3A/IP3A
 (____/____) Didasarkan kebutuhan partisipatif pada primer/bekunder
- Poktan/Gapoktan Muayawarah anggota Poktan
 Besaran : Ditetapkan langsung oleh pengurus Gapoktan
 (____/____) Didasarkan kebutuhan partisipatif pada primer/bekunder

b. Rencana alokasi dana iuran pengelolaan irigasi

Alokasi Penggunaan iuran	Persentase (%)		
	P3A	GP3A	IP3A
- Administrasi			
- Honor Pengurus			
- Upah pungut			
- Biaya OP			
- Kontribusi ke GP3A			
- Kontribusi ke IP3A			
- Lainnya: (.....)			

c. Persentase tingkat penumpulan iuran pengelolaan irigasi dari target harapan pada DI setempat

- P3A unit < 25% 25% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
- GP3A < 25% 25% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
- IP3A < 25% 25% - 50% 51% - 75% 76% - 100%

d. Jumlah iuran yang terkumpul memenuhi kebutuhan kelembagaan dan kinerja pengelolaan irigasi

- P3A unit Berlebih Cukup Kurang
- GP3A Berlebih Cukup Kurang
- IP3A Berlebih Cukup Kurang

e. Upaya untuk menambah jumlah pendanaan kelembagaan dan kinerja pengelolaan irigasi sesuai kebutuhan

- P3A unit Ada Tidak ada
- GP3A Ada Tidak ada
- IP3A Ada Tidak ada

f. Cara mengatasi kelangkaan anggaran jika tidak ada upaya penambahan pendanaan kelembagaan dan pengelolaan irigasi

- P3A unit Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan dana sendiri Sebagian kegiatan dikurangi/tidak dilaksanakan
- GP3A Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan dana sendiri Sebagian kegiatan dikurangi/tidak dilaksanakan
- IP3A Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan dana sendiri Sebagian kegiatan dikurangi/tidak dilaksanakan

Jika ada penambahan dana, upaya yang dilakukan dengan cara

- P3A unit Usaha sendiri Bantuan Pemerintah Bantuan pihak lain
- GP3A Usaha sendiri Bantuan Pemerintah Bantuan pihak lain
- IP3A Usaha sendiri Bantuan Pemerintah Bantuan pihak lain

- g. Kemauan dan kemampuan petani membayarkan pengelolaan irigasi
- Kemauan Tidak mau/bersedia Mau/bersedia
 - Kemampuan Tidak mampu Kurang mampu Mampu
- h. Tanggapan petani terhadap pembayaran iuran pengelolaan irigasi
- Beban Kewajiban
- i. Jumlah Poktan yang memiliki usaha simpan pinjam
- <25% 25 - 50% >50%

5. Aspek Fasilitas Usahatani

a. Fasilitas P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan dalam peningkatan kegiatan usahatani untuk anggotanya

- P3A unit Ada Tidak ada
- GP3A Ada Tidak ada
- IP3A Ada Tidak ada
- Poktan Ada Tidak ada
- Gapoktan Ada Tidak ada

Bentuk bantuan/fasilitas apa yang diberikan kepada petani (jika ada)

- Pupuk Pestisida Alasiran Lambi jamur Lainnya

b. Fasilitas P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan dalam peningkatan pendapatan petani

- P3A unit Ada Tidak ada
- GP3A Ada Tidak ada
- IP3A Ada Tidak ada
- Poktan Ada Tidak ada
- Gapoktan Ada Tidak ada

c. Bentuk bantuan/fasilitas apa yang diberikan kepada petani (jika ada)

- Akses kredit Akses pasar Harga

d. Jumlah P3A, Poktan yang memiliki usaha simpan pinjam

- P3A Tidak ada <25% 25 - 50% >50%
- Poktan Tidak ada <25% 25 - 50% >50%

5. Aspek Penyuluhan

a. Jumlah Penyuluh yang bertugas di desa di area DI tersebut

Porg L Σ org

b. Jumlah Petani/Poktan yang mendapat akses Penyuluh

- > 25% 50 - 75% > 75% 100%

V. KONDISI USAHATANI

a. luas areal tanam dan panen pada DI selampai setahun terakhir

Jenis Usahatani	Luas Areal (ha)					
	Musim Tanam I		Musim Tanam II		Musim Tanam III	
	Tanam	Panen	Tanam	Panen	Tanam	Panen
- Padi						
- Pelewiija						
- Sayuran						
- Ikan						
- Lainnya:						

b. produktivitas usahatani aktual setiap musim tanam pada DI setempat

Jenis Usahatani	Produktivitas hasil usahatani (ton/ha GKP)		
	Musim Tanam I	Musim Tanam II	Musim Tanam III
- Padi			
- Palawija			
- Sayuran			
- Ikan			
- Lainnya:			

c. rata-rata pendapatan usahatani setiap Musim Tanam (MT)

Jenis Usahatani	Pendapatan Usahatani (Rp/ha/luas)			Keterangan
	MT - I	MT - II	MT - III	
- Padi				
- Palawija				
- Sayuran				
- Ikan				
- Lainnya:				
Jumlah				

d. Jumlah petani yang menanam tanaman bernilai ekonomi tinggi/TBET

Jenis Tanaman	Jumlah Petani	Rata-rata Panen (KW)	Rata-rata Pendapatan/Th	Keterangan
-				
-				
-				

e. Teknologi yang diterapkan dalam usaha tani padi

Jenis Teknologi	Luas Area yg d	Jumlah Petani
- SRI	
- Jejer Legowo	
- DI Ha	

Mekanisasi / Penggunaan Aliran

Ada Tidak ada

f. Pengolahan Pasca Panen

Ada Tidak ada

VI. POTENSI SUMBERDAYA LOKAL

a. Sumber air yang belum dimanfaatkan secara umum

Ada Tidak ada

b. Tanaman Pangan spesifik lokal

Ada Tidak ada

c. Pangan spesifik lokal dari hasil pertanian

Ada Tidak ada

Analisa Usahatani

Nama Di :
 Posisi dalam Saluran : Hulu/ Tengah/Hilir
 Tanggal Survey :

1. Padi Musim Tanam I

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1.	Luas Lahan	Ha				
2.	Penerimaan					-
	a. Produksi/GKP	Kw			-	
	b. Menyewakan Lahan (jika ada)	Ha			-	
	c. Menyewakan Asintan (jika ada)	Unit			-	
3.	Biaya Produksi					-
	a. Benih	Kg			-	
	b. Pupuk Anorganik				-	-
	- Urea	Kg			-	
	- NPK	Kg			-	
	- SP36	Lt			-	
	- KCL	Lt			-	
	- -----				-	
	c. Pupuk Organik	Kg/Lt			-	
	d. Pestisida/Herbisida	Lt			-	
	e. Iuran Air	Rp			-	
	f. Pajak Bumi	Rp			-	
	g. Biaya Tenaga Kerja Luar Keluarga				-	-
	- Pengolahan Tanah	HOK			-	
	- Penyemaihan				-	
	- Penanaman	HOK			-	
	- Pemupukan	HOK			-	
	- Pengendalian HPT	HOK			-	
	- Biaya Panen	HOK			-	
	h. Sewa Lahan	Ha			-	
	i. Biaya Tenaga Kerja Dalam Keluarga				-	-
	- Pengolahan Tanah	HOK			-	
	- Penyemaihan	HOK			-	
	- Penanaman	HOK			-	
	- Pemupukan	HOK			-	
	- Pengendalian HPT	HOK			-	
	- Biaya Panen	HOK			-	
4.	Pendapatan (2 - 3 (a+b+c+e+f+g+h))					-
5.	Keuntungan (2 - 3 (a+b+c+e+f+g+h-i))					-

2. Padi Musim Tanam II

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1.	Luas Lahan	Ha				
2.	Penerimaan					-
	a. Produksi/GKP	Kw			-	
	b. Menyewakan Lahan (jika ada)	Ha			-	
	c. Menyewakan Asintan (jika ada)	Unit			-	
3.	Biaya Produksi					-
	a. Benih	Kg			-	
	b. Pupuk Anorganik				-	-
	- Urea	Kg			-	
	- NPK	Kg			-	

- SP36	Lt				-	
- KCL	Lt				-	
-					-	
c. Pupuk Organik	Kg/Lt				-	
d. Pestisida/Herbisida	Lt				-	
e. Iuran Air	Rp				-	
f. Pajak Bumi	Rp				-	
g. Biaya Tenaga Kerja Luar Keluarga					-	-
- Pengolahan Tanah	HOK				-	
- Penyemaian					-	
- Penanaman	HOK				-	
- Pemupukan	HOK				-	
- Pengendalian HPT	HOK				-	
- Biaya Panen	HOK				-	
h. Sewa Lahan	Ha				-	
i. Biaya Tenaga Kerja Dalam Keluarga					-	-
- Pengolahan Tanah	HOK				-	
- Penyemaian	HOK				-	
- Penanaman	HOK				-	
- Pemupukan	HOK				-	
- Pengendalian HPT	HOK				-	
- Biaya Panen	HOK				-	
4. Pendapatan (2 - 3 (a+b+c+e+f+g+h))						-
5. Keuntungan (2 - 3 (a+b+c+e+f+g+h+i))						-

3. Padi Musim Tanam III

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1.	Luas Lahan	Ha				
2.	Penerimaan					-
a.	Produksi/GKP	Kw			-	
b.	Menyewakan Lahan (jika ada)	Ha			-	
c.	Menyewakan Alsintan (jika ada)	Unit			-	
3.	Biaya Produksi					-
a.	Benih	Kg			-	
b.	Pupuk Anorganik				-	-
- Urea	Kg				-	
- NPK	Kg				-	
- SP36	Lt				-	
- KCL	Lt				-	
-					-	
c.	Pupuk Organik	Kg/Lt			-	
d.	Pestisida/Herbisida	Lt			-	
e.	Iuran Air	Rp			-	
f.	Pajak Bumi	Rp			-	
g.	Biaya Tenaga Kerja Luar Keluarga				-	-
- Pengolahan Tanah	HOK				-	
- Penyemaian					-	
- Penanaman	HOK				-	
- Pemupukan	HOK				-	
- Pengendalian HPT	HOK				-	
- Biaya Panen	HOK				-	
h.	Sewa Lahan	Ha			-	
i.	Biaya Tenaga Kerja Dalam Keluarga				-	-
- Pengolahan Tanah	HOK				-	
- Penyemaian	HOK				-	
- Penanaman	HOK				-	

	- Pemupukan	HOK				-
	- Pengendalian HPT	HOK				-
	- Biaya Panen	HOK				-
4.	Perawatan (2 - 3) (a-b+c+d+e-f-g-h)					-
5.	Keuntungan (2 - 3) (a-b+c+d+e-f-g-h-i)					-

4. Padi/p

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1.	Luas Lahan	Ha				
2.	Penanaman					-
	a. Produksi	Ku			-	
3.	Biaya produksi					-
	a. Benih/bibit	Kg			-	
	b. Pupuk Anorganik				-	-
	- Urea	Kg			-	
	- NPK	Kg			-	
	- SP36	Li			-	
	- KCL	Li			-	
	- ...				-	
	c. Pupuk Organik	Kg/Li			-	
	d. Pestisida/Herbisida	Li			-	
	e. Irigasi Air	Rp			-	
	f. Ratak Bumi	Rp			-	
	g. Biaya Tenaga Kerja Luar Keluarga				-	-
	- Pengolahan Tanah	HOK			-	
	- Penyemprotan				-	
	- Penanaman	HOK			-	
	- Pemupukan	HOK			-	
	- Pengendalian HPT	HOK			-	
	- Biaya Panen	HOK			-	
	h. Sewa Lahan	Ha			-	
	i. Biaya Tenaga Kerja Dalam Keluarga				-	-
	- Pengolahan Tanah	HOK			-	
	- Penyemprotan	HOK			-	
	- Penanaman	HOK			-	
	- Pemupukan	HOK			-	
	- Pengendalian HPT	HOK			-	
	- Biaya Panen	HOK			-	
4.	Perawatan (2 - 3) (a-b+c+d+e-f-g-h)					-
5.	Keuntungan (2 - 3) (a-b+c+d+e-f-g-h-i)					-

5. Sawah

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1.	Luas Lahan	Ha				
2.	Penanaman					-
	a. Produksi	Ku			-	
3.	Biaya produksi					-
	a. Benih/bibit	Kg			-	
	b. Pupuk Anorganik				-	-
	- Urea	Kg			-	
	- NPK	Kg			-	
	- SP36	Li			-	
	- KCL	Li			-	
	- ...				-	
	c. Pupuk Organik	Kg/Li			-	
	d. Pestisida/Herbisida	Li			-	

Lampiran 7. Formulir Rekapitulasi Permasalahan

No	Aspek	Uraian Masalah	Penyebab Masalah	Kemampuan Pemecahan Masalah		Prioritas
				Mandiri	Bantuan	
1	Kondisi Umum - Sumber Air dan Ketersediaan Air Irigasi - Kondisi Fisik dan Tingkat Kelungsihan Jaringan Irigasi					
2	Sosial Ekonomi					
3	Teknis Irigasi - Operasi - Pemeliharaan - Rehabilitasi					
4	Kelembagaan					
5	Usahatani					
6	Potensi Sumber Daya Lokal					
7	Lain-lain Pembinaan Pendampingan Partisipasi Perempuan dalam Irigasi pertanian					

Lampiran 8. Form Pertanyaan Pentapisan Sosial dan Lingkungan

PERTANYAAN PENTAPISAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN Nama Pekerjaan / Kegiatan : Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif DI (.....Ha)

Pertanyaan Pentapisan Mitigasi	Tidak	Ya	Tindakan
A. Masalah Sosial			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah ada pengadaan tanah skala kecil, termasuk kehilangan aset, kehilangan akses terhadap mata pencaharian (<10% dari pemilikan lahan dan berpengaruh pada <200 orang)? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika Ya, Jelaskan secara singkat kunci langkah-langkah mitigasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah ada kemungkinan menggunakan tanah milik masyarakat yang disumbangkan secara sukarela? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika Ya, harus dibuat Surat Pernyataan Sumbangan Tanah (lihat contoh)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah ada pengadaan tanah yang berskala besar (>10 aset terkena dan berpengaruh pada >200 orang) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika Ya, berapa KK dan Jelaskan secara singkat kunci langkah-langkah mitigasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah ada kemungkinan pemindahan penduduk (termasuk yang tinggal di tanah negara) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan secara singkat kunci langkah-langkah mitigasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah ada masyarakat adat/ kelompok khusus di wilayah proyek 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika Ya, gambarkan secara singkat siapa mereka dan rencana-rencana spesifik untuk memastikan mereka akan mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi. Buat Rencana Pengembangan MAR (lihat lampiran..)
<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi diri dan diakui oleh orang lain? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> - Keterkaitan sumber daya alam? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> - Adat budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang terpisah dari mayoritas? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa asli? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah ada potensi konflik sosial lainnya? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika Ya, Jelaskan sumber konflik dan kunci langkah-langkah mitigasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya mata pencaharian atau kondisi hidup perempuan atau keluarga miskin di daerah 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan secara singkat kunci langkah-langkah mitigasi

layanan proyek?

B. Masalah Lingkungan

B.1 Kajian Lokasi Rencana Proyek: Apakah lokasi rencana proyek	Jawaban			Apakah hal tersebut akan berdampak penting?			Penjelasan
	Ya	Tida	Ragu	Ya	Tida k	Ragu	
1. Akan mengubah tata guna lahan yang ada?							
2. Akan mengubah kelimpahan, kualitas dan daya regenerasi sumber daya alam yang berada di lokasi?							
3. Akan mengubah kapasitas absorpsi lingkungan alami, khususnya daerah berikut? ³ a. Lahan basah b. Daerah pesisir c. Area pegunungan dan hutan d. Kawasan lindung alam dan taman nasional e. Kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan f. Daerah yang memiliki kualitas lingkungan yang telah melebihi batas ambang yang ditetapkan g. Daerah berpenduduk padat h. Lanskap yang memiliki nilai penting sejarah, budaya atau arkeologi							
B.2 Kajian Karakteristik Proyek⁴ Apakah rencana proyek:							
1. Akan mengubah bentuk lahan atau bentang alam?							
2. Akan mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaru maupun yang taik terbaharui?							
3. Dalam proses dan kegiatannnya akan menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam							

³ Daftar Kawasan Lindung yang harus dihindari

⁴ Kegiatan mencakup rehabilitasi saluran irigasi dan tanggul, serta rehabilitasi bangunan irigasi

pemamfaatannya?							
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya?							
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya?							
6. Akan mengintroduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik?							
7. Akan membuat dan menggunakan bahan hayati dan non-hayati?							
8. Akan menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup?							
9. Akan mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara?							
B.3 Kajian Potensi Dampak Iklim dan Bencana Apakah rencana proyek:							
1. Apakah area proyek rentan terkena bencana seperti gempa, banjir, longsor, topan, badai, tsunami atau perubahan iklim							
2. Apakah perubahan temperatur, curah hujan, atau peristiwa ekstrem mempengaruhi kesinambungan proyek.							
3. Apakah aspek demografis atau sosial ekonomis area proyek tersebut sudah rentan (misalnya tingginya kejadian penduduk yang termarginalisasi, migran desa-kota, pemukiman liar, etnik minoritas, perempuan dan anak-anak)?							
4. Apakah proyek berpotensi meningkatkan kerentanan iklim atau bencana dari lingkungan sekitarnya?							

TANDA TANGAN PENGUSUL:

Nama : (Di isi nama penanggung jawab pelaksanaan program

Posisi/Jabatan : (Di isi Jabatan Ybs pada Dinas PU-SDA

Tanggal :

Formulir Pengamanan Lingkungan dan Sosial

LOGO PEMDA

Republik Indonesia

Tanggal:

Formulir A1 Pengamanan Lingkungan dan Sosial

Pemohon: DPU dan ESDM Kabupaten	Tahun: 20.....
Nama pekerjaan: Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif DI (..... ha)	Biaya :.....,-
<p>Saya menyatakan bahwa proyek ini tidak akan menimbulkan dampak sosial atau lingkungan yang signifikan serta tidak termasuk dalam Negative List dan tidak termasuk dalam Kategori A untuk pengamanan Lingkungan, Sosial dan Masyarakat Adat. Untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul, maka perlu penerapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta SOP (Prosedur Operasional Standar) sesuai dengan peraturan yang berlaku selama pra-konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.</p> <p>Disaring oleh:</p>	
<p>Keterangan:</p> <p>Tujuan : Mengembalikan saluran ke kondisi semula Cakupan ; Contoh) lining (pasangan batu), perbaikan beberapa bangunan Output : (Contoh) 200 meter panjang saluran, bangunan pelengkap : 1 buah Outcome : mengembalikan ke pelayanan area semula</p>	

TANDA TANGAN PENGUSUL:

Nama :

Posisi/Jabatan :

Tanggal :

Lampiran 9a. Daftar Hadir Peserta Pertemuan: _____ *

DAERAH IRRIGASI:		KABUPATEN:		HARI:		TANGGAL:		TEMPAT:	
NO	NAMA	JENIS KELAMIN		INSTANSI/PERWAKILAN	NO. HP/ALAMAT EMAIL	PARAF			
		L	P						
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
TOTAL LAKI-LAKI & PEREMPUAN:									

*) Disesuaikan dengan jenis kegiatannya menurut alur kegiatan PSETK:

1. Rapat Koordinasi/Persiapan
2. Pembentukan Tim Penyusun PSETK & Penjelasan Form PSETK
3. Sosialisasi Awal PSETK di Daerah Irigasi
4. Pembahasan Analisis PSETK
5. Sosialisasi hasil PSETK

MASUKAN/SARAN/KOMENTAR		KEGIATAN	:	
		TANGGAL	:	
		TEMPAT	:	
LAKI-LAKI				
NAMA:	LEMBAGA:	NAMA:	LEMBAGA:	
<i>Tulis masukan, di sini</i>		<i>Tulis masukan, di sini</i>		
PEREMPUAN				
NAMA:	LEMBAGA:	NAMA:	LEMBAGA:	
<i>Tulis masukan, di sini</i>		<i>Tulis masukan, di sini</i>		
NAMA:	LEMBAGA:	NAMA:	LEMBAGA:	
<i>Tulis masukan, di sini</i>		<i>Tulis masukan, di sini</i>		

Lampiran 9b. Daftar Hadir Peserta di tingkat Daerah Irigasi/Kecamatan/Desa

DAERAH IRIGASI:	KABUPATEN:	HARI:	TANGGAL:	TEMPAT:
-----------------	------------	-------	----------	---------

NO	NAMA	SILAKAN PILIH		INSTANSI/PERWAKILAN/DESA	NO. HP/ALAMAT EMAIL	PARAF
		L	P			
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
TOTAL LAKI-LAKI & PEREMPUAN:						

Lampiran 10. Form Foto Dokumentasi Pelaksanaan PSETK

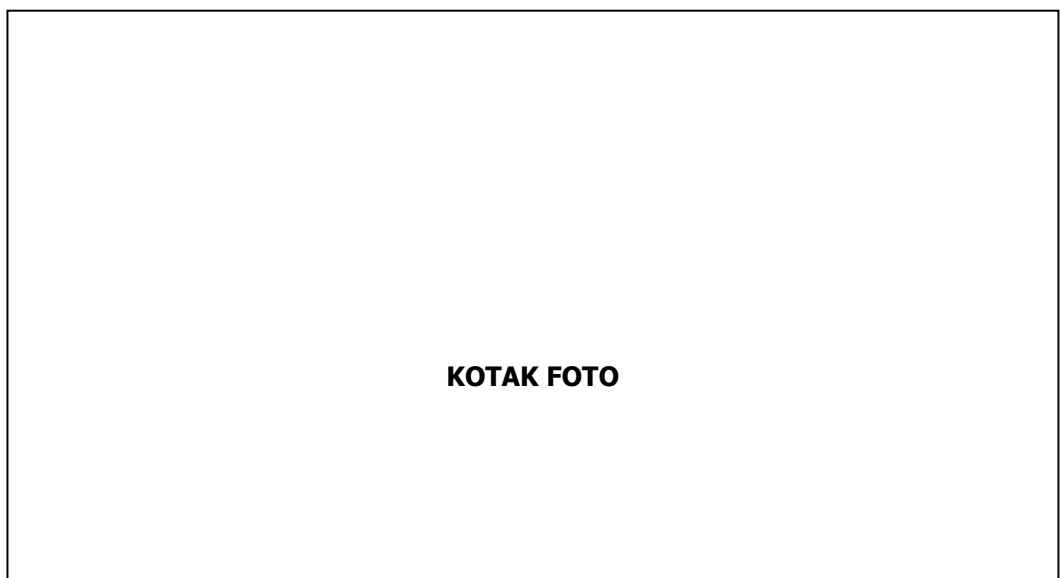
Foto Dokumentasi Pelaksanaan PSETK



Gambar(keterangan)

01. Nama Kegiatan (Pertemuan/Rapat/Penelusuran Jaringan/Pembahasan/dll)

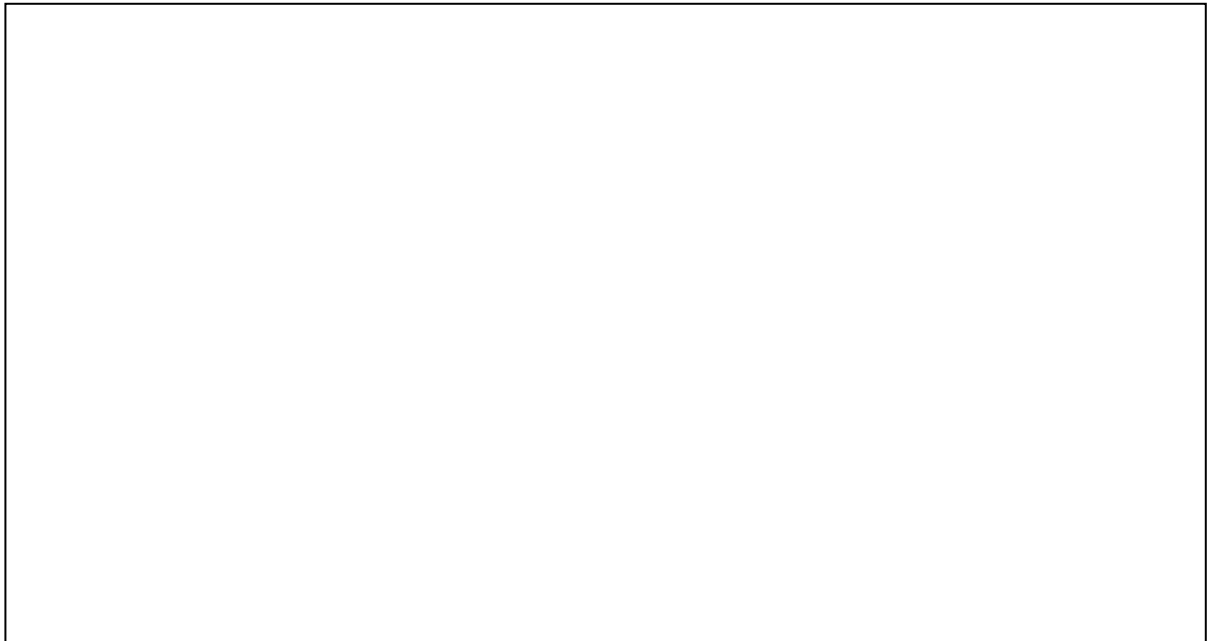
02. Nama Kegiatan (Pertemuan/Rapat/Penelusuran Jaringan/Pembahasan/dll)



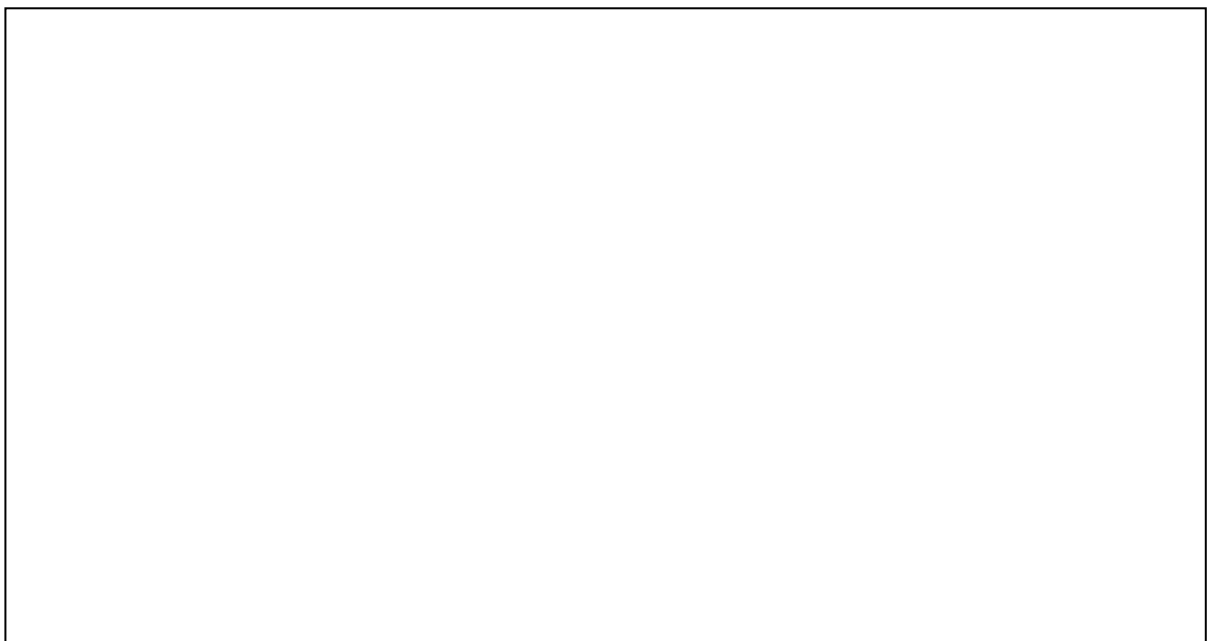
Gambar(keterangan)

Lampiran 11. Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan

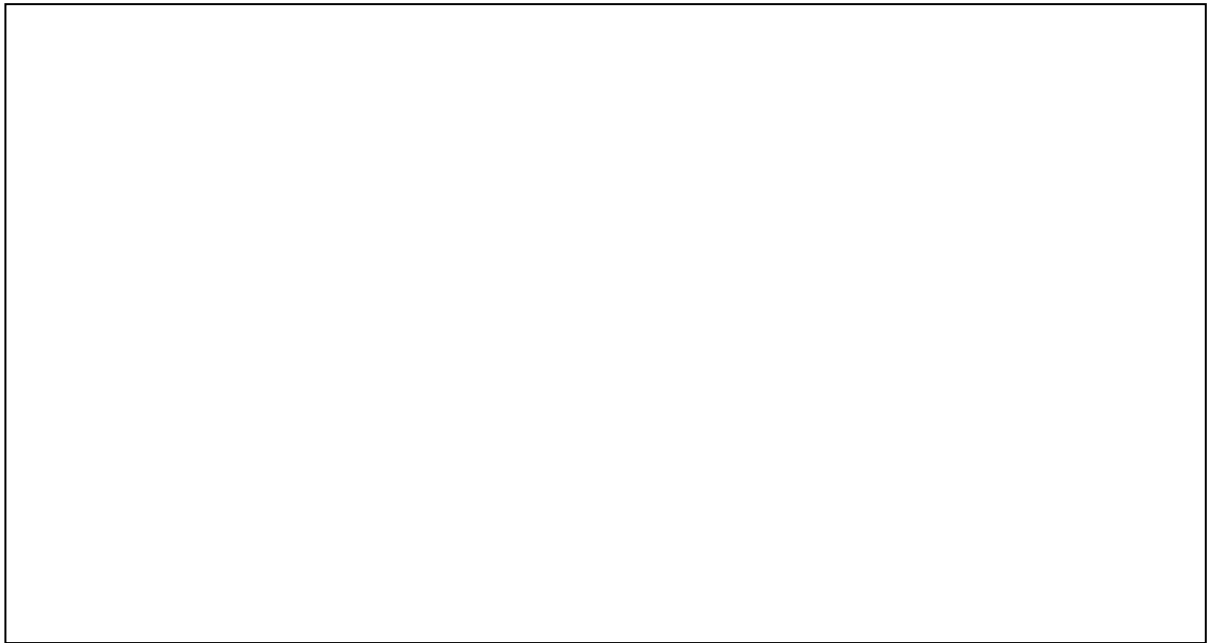
Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A ke 1 di DI




Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A ke 2. di DI



Struktur Organisasi Poktan/Gapoktan ke 1 di DI



Struktur Organisasi Poktan/Gapoktan ke 2. di DI



Lampiran 12. Form Berita Acara Hasil Pertemuan Awal Kegiatan Penyusunan PSETK

BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN AWAL KEGIATAN PENYUSUNAN PSETK

Sehubungan dengan adanya rencana kegiatan penyusunan dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) Tahun Anggaran, pada D.I., maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :

Waktu : pukul s.d.

Tempat :

telah diselenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah (Bappeda, Dinas PU SDA dan Dinas Pertanian) dan Unsur Non Pemerintah (TPM/KTPM, KPL, P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan, Pengguna Jasa Air Irigasi) dengan jumlah laki-laki orang dan perempuan orang, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa I ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik

- Meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan PSETK
- Membentuk tim penyusun PSETK

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : jabatan

.....

Narasumber : 1. jabatan

2. jabatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyetujui beberapa hal yang *ditetapkan menjadi keputusan akhir dari pertemuan awal kegiatan penyusunan PSETK*, yaitu :

Membentuk tim penyusun PSETK pada DI, adalah sebagai berikut :

c. Tim Penyusun :

- Ketua :

- Anggota : 1.....

2.....

d. Fasilitator :

- Koordinator Fasilitator :..... Jabatan
- Anggota :1.....Jabatan.....
- 2.....Jabatan.....
- 3.....Jabatan.....
- 4.....Jabatan.....
- 5.....Jabatan.....
- 6 dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(*nama* *tempat*),

.....(*tanggal*)

Pemimpin Rapat

(.....)

Nama Lengkap

Wakil Peserta Pertemuan Awal Kegiatan Penyusunan Psetk

No	Nama	L/P	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4	Dst		

Lampiran 13. Berita Acara Pembahasan Hasil PSETK

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PSETK

DAERAH IRIGASI..... (LUAS...ha)

KABUPATEN.....

PROVINSI

Pada hari initanggal.....bulan..... tahun..... bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi, telah diadakan--- kesepakatan/musyawarah secara bersama-sama melaksanakan Pembahasan Hasil Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) pada daerah irigasi.....

Dalam musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan dari :--

1. UPTD Pertanian, Kecamatan.....-----
2. UPTD Pengairan..Kecamatan.....-----
3. P3A.....Desa.....
4. P3A.....Desa.....
5. P3A.....Desa.....
6. PoktanDesa.....
7. Gapoktan.....Desa.....
8. TPM Daerah Irigasi

Adapun hasil pembahasan ini menghasilkan beberapa masukan/saran pada beberapa penjelasan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Dari perempuan/kelompok wanita tani

1.
2.
3. dst

.....20...

1. UPTD Pertanian, Kec.....(.....)
2. UPTD Pengairan Kec..... (.....)
3. Ketua P3A Desa (.....)
4. Ketua P3A Desa (.....)
5. Ketua P3A Desa (.....)
6. Ketua P3A Desa (.....)

7. Poktan Desa..... (.....)
8. Gapoktan Desa..... (.....)
9. TPM Daerah Irigasi(.....)

Mengetahui
Kepala Bappeda/ Kepala BBWS/BWS*

(.....)

**) Khusus untuk DI Kewenangan pusat diketahui bersama antara Kepala Bappeda dan Kepala BBWS/BWS*

Lampiran 14. Berita Acara Penyusunan PSETK

BERITA ACARA PENYUSUNAN PSETK

DAERAH IRIGASI.....(Luasha)

KABUPATEN.....

PROVINSI.....

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di Desa.....Kecamatan..... Kabupaten....., Provinsi telah diadakan kesepakatan/musyawarah secara bersama-sama melaksanakan Penyusunan Dokumen---- Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan(PSETK) pada daerah irigasi.....guna menindaklanjuti hasil kegiatan penelusuran jaringan irigasi dan kunjungan lapangan yang telah----- dilaksanakan pada tanggal....., bulan,tahun, sehingga menghasilkan gambaran /profil potensi-dan permasalahan daerah irigasi..... ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, teknis irigasi dan teknis----- pertanian serta aspek kelembagaan. -----

Dalam penyusunan Dokumen PSETK ini dihadiri oleh Laki-lakiorang, perempuanorang perwakilan dari :

- 1...../Bappeda/Penanggung Jawab(merangkap Ketua Tim)
2./SDA/Pelaksana Tim (merangkap Anggota Tim)
3./Pertanian/Pelaksana Tim(merangkap Anggota Tim)
4./TPM/Pelaksana Tim (merangkap Anggota Tim)
5./ P3A/GP3A/IP3A
- 6......./KWT

Adapun hasil penyusunan dokumen PSETK ini menghasilkan-beberapa masukan/saran pada beberapa penjelasan sebagai berikut:-----

1.
2.
3.
4.
5.
6. dst

.....20...

1. Ketua Tim (.....)
2. Anggota Tim (.....)
3. Anggota Tim (.....)
4. Anggota Tim (.....)

Mengetahui
Kepala Bappeda/ Kepala BBWS/BWS*

(.....)

**) Khusus untuk DI Kewenangan pusat diketahui bersama antara Kepala Bappeda dan Kepala BBWS/BWS*

Lampiran 15. Form Daftar List Lampiran Laporan PSETK

Daftar List Lampiran Laporan PSETK

No. Lamp.	Judul Lampiran	Check List *)	Keterangan **)
1.	Formulir isian PSETK <ul style="list-style-type: none"> • Profil Umum • Profil Sumber, Ketersediaan, dan Alokasi air irigasi • Profil Sosial Ekonomi (seluruh desa pada DI tersebut) • Profil Teknik • Profil Kelembagaan (lampiran semua P3A yang ada) 		
	Peta/sketsa/skema jaringan Irigasi DI		
	Peta/Sketsa/Skema Bangunan Irigasi		
	Peta/sketsa/skema beberapa Desa pada DI bersangkutan		
2.	Pola dan Jadwal Tanam		
3.	Daftar Masalah, penanganan masalah, rekap kebutuhan, dan Rancana Tindak Lanjut /Program Kerja.		
4.	Contoh Screening/Pentapisan tentang Kondisi lingkungan dan Sosial DI		
5.	Daftar hadir Peserta pertemuan : <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi • Pertemuan awal tingkat DI • Penjelasan Form PSETK • Pembentukan TIM • Pembahasan Analisis hasil PSETK • Sosialisasi hasil PSETK 		
	Daftar Hadir Peserta Penelusuran Jaringan Irigasi		
6.	Foto Dokumentasi Pelaksanaan PSETK		
7.	Struktur Organisasi P3A/ GP3A/IP3A maupun Poktan/ Gapoktan di DI tersebut		
8.	Berita Acara Pembahasan Hasil PSETK		
9.	Berita Acara Penyusunan PSETK		
10.	Daftar List Lampiran Laporan PSETK		

Catatan: *) beri tanda conteng ✓ apabila sudah ada, dan tanda X jika tidak ada

***) beri keterangan lengkap/belum lengkap dan mengapa lampiran tidak ada/belum ada

Lampiran 16. Sistematika Laporan PSETK

Sistematika laporan PSETK terdiri 3 bagian, yaitu:

Penjelasan Sistematika Penulisan Laporan PSETK Sistematika penulisan laporan PSETK adalah:

I. Bagian Muka

1. Cover

Menggunakan Cover dengan logo BBWS/Bappeda Provinsi/Bappeda Kabupaten sesuai kewenangannya DI kewenangan pelaksanaan PSETK dengan warna dasar cover putih

2. Checklist Laporan

Memuat list data yang ada dalam laporan sehingga akan tampak sampai sejauh mana kelengkapan data yang tersedia dalam laporan yang disajikan biasanya berupa data Lampiran yang menjadi pelengkap dokumen PSETK.

3. Berita Acara

Memuat tentang Berita Acara Pelaksanaan PSETK mulai dari penelusuran jaringan hingga penyusunan laporan PSETK (kapan penandatanganan penyusunan laporan, tempat penandatanganan, tanggal dimulai dan berakhirnya kegiatan PSETK, Wilayah / DI yang dilaksanakan PSETK, dll)

Naskah ditandatangani oleh Pelaksana PSETK yang terdiri dari wakil Bappeda, wakil Dinas Pertanian, wakil Dinas Pu/SDA, KPL, P3A, TPM dan diketahui oleh KPIU/KPMU Bappeda selaku Fasilitator Pelaksanaan PSETK.

4. Kata Pengantar

Memuat tentang Pengantar Laporan PSETK, yang di bagian akhir (bawah) ditandatangani oleh Kepala BBWS /Kepala Bappeda atau pejabat Bappeda yang diberi mandat oleh Kepala BBWS/Bappeda sesuai DI kewenangannya sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan PSETK bukan oleh TPM/KTPM atau pihak lainnya.

5. Daftar Isi

Memuat tentang bab/subbab yang menjadi bagian isi laporan PSETK mulai dari ceklis Laporan hingga Lampiran.

6. Daftar Tabel

Memuat tentang nomor tabel dan judul tabel yang menjadi bagian isi laporan PSETK

7. Daftar Gambar

Memuat tentang nomor Gambar dan judul Gambar yang menjadi bagian isi laporan PSETK

8. Daftar Lampiran

Memuat tentang nomor Lampiran dan judul Lampiran yang menjadi bagian isi laporan PSETK

II. Bagian Isi/Substansi

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi:

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan PSETK

Menjelaskan apa yang melatarbelakangi pentingnya dilaksanakan PSETK pada Daerah Irigasi yang bersangkutan,

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan PSETK

Menjelaskan apa yang menjadi maksud dan tujuan disusunnya PSETK bagi kepentingan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.

1.3. Kegunaan

Menjelaskan kegunaan dari tersusunnya Laporan PSETK bagi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di daerah irigasi

1.4. Keluaran Yang Diharapkan

Menjelaskan keluaran apa yang diharapkan dari tersusunnya laporan PSETK.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH IRIGASI

Gambaran Umum Wilayah Daerah Irigasi (DI), berupa penjelasan singkat secara naratif tentang :

1. Profil Umum DI (mengacu pada Format PSETK yang telah diisi) termasuk sejarah DI, nama-nama P3A dan Jumlah Anggotanya)
2. Profil Sumber, Ketersediaan dan Alokasi Air Irigasi
3. Profil Teknik
4. Profil Sosial-Ekonomi
5. Profil Kelembagaan
6. Kondisi Usahatani
7. Potensi Sumber Daya Lokal
8. Fasilitas Infrastruktur
9. Budaya Lokal

Pada Format PSETK data mentah yang diisikan berupa data kualitatif, sehingga untuk menyajikan informasi yang akurat perlu penambahan penjelasan lagi.

Contoh:

- *Jenis Konflik perlu disampaikan konflik apa yang pernah terjadi dari masing-masing jenis/item yang tertuang jika memang ada,*
- *Kegiatan Pemeliharaan, bila diisi rutin/berkala, perlu dijelaskan intensitasnya kapan, berapa kali, dan lain lain,*
- *Budaya lokal apa saja yang terkait langsung dengan kegiatan pengelolaan Irigasi dan pertanian,*
- *Peluang usaha ekonomi produktif bila diisi potensial, perlu ada penjelasan dari item yang disajikan pada kuesioner tersebut.*

BAB III. ANALISA DAN HASIL PSETK

Memuat informasi tentang uraian analisa hasil PSETK dan persoalan yang mendasar yang terjadi di wilayah DI tersebut, ditinjau dari aspek:

1. Sosial Ekonomi
 2. Teknik
 3. Kelembagaan
 4. Usaha Tani
 5. Potensi Sumber Lokal
- Akan lebih lengkap apabila digali tentang Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang ada di wilayah DI tersebut dengan menggunakan analisis secara sederhana.
 - Dijelaskan pula pada titik mana secara teknis jaringan irigasi terjadi kerusakan sehingga menjadi prioritas untuk perbaikan (dilengkapi dengan peta jaringan irigasi yang dilengkapi dengan spot/titik kerusakan dan yang perlu penanganan serius yang menjadi bagian Lampiran dari penjelasan bab analisis)
 - Dari hasil analisa tersebut dapat diidentifikasi berbagai Kebutuhan bagi perencanaan program seperti untuk revitalisasi/pembentukan P3A, kesepakatan kerjasama, SID-P, kegiatan kontruksi dll.

BAB IV. MASALAH dan USULAN

Memuat tentang Masalah-masalah yang dihadapi dan rekomendasi rencana tindak lanjut ditinjau dari berbagai aspek :

2. Sosial Ekonomi
3. Teknik
 - a. Sumber, Ketersediaan dan Alokasi Air Irigasi
 - b. Fisik bangunan
4. Kelembagaan
5. Usaha Tani
6. Potensi Sumber Lokal

Masalah dan usulan tindak yang dituangkan merupakan hasil pembahasan antara Pelaksana PSETK dengan Masyarakat/Anggota P3A, mencakup tentang penjelasan Masalah yang timbul, Penyebab Masalah, Kemampuan Pemecahan Masalah.

Usulan merupakan usulan rencana tindak lanjut untuk mengatasi persoalan tersebut sudah merupakan skala prioritas, sekaligus mempertimbangkan sumber dana dimaksud setidaknya memuat, antara lain;

1. Usulan tindak lanjut bagi masyarakat petani (P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan) adalah sebagai dasar pertimbangan dalam:
 - a. Proses perencanaan kegiatan pembentukan/penyegaran (revitalisasi/restrukturisasi/rekelembagaan) dan pengembangan kelembagaan petani P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi;
 - b. Penyusunan program kerja pengelolaan irigasi – pertanian partisipatif dalam wilayah kerjanya bersama Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Kelompok Pendamping Lapangan (KPL);

- c. Pengembangan legalisasi badan hukum kelembagaan petani P3A/GP3A/IP3A maupun Poktan/Gapoktan;
 - d. Kebutuhan pelatihan baik aspek teknis, kelembagaan maupun usahatani dan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal;
 - e. Penetapan iuran pengelolaan irigasi-pertanian dan penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi-pertanian (AKNPI/AKNOP) dalam wilayah kerjanya;
 - f. Pelayanan kebutuhan anggota kelembagaan petani daerah irigasi; dan
 - g. Penyusunan usulan Dana Pengelolaan Irigasi-pertanian (DPI) dan Kerjasama Pengelolaan Irigasi-pertanian (KSP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan irigasi-pertanian.
2. Usulan tindak lanjut bagi Komisi Irigasi sekurang-kurangnya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam:
- a. Penyusunan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif dan responsif gender dalam menunjang kinerja pembangunan daerah;
 - b. Membuat rumusan kebijakan yang sensitif gender untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi-pertanian;
 - c. Membuat rumusan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi-pertanian, serta rencana tahunan penyediaan air irigasi-pertanian;
 - d. Membuat rumusan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi-pertanian bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. Menyusun prioritas alokasi Dana Pengelolaan Irigasi-pertanian (DPI) yang diusulkan oleh kelembagaan P3A/GP3A/IP3A pada suatu daerah irigasi-pertanian;
 - f. Memberikan masukan dan pertimbangan atas izin alih fungsi lahan beririgasi-pertanian; dan
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif dan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A.
 - h. Secara umum, dokumen PSETK merupakan basis dalam penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) yang akan disusun bersama Dinas/Balai/PPIU/KPIU
3. Usulan tindak lanjut bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan irigasi-pertanian sekurang-kurangnya mencakup:
- a. Menyusun rencana strategis pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif dan pemberdayaan kelembagaan P3A/ GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan yang responsif gender;
 - b. Menentukan Fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A , Poktan/Gapoktan pada suatu daerah irigasi-pertanian melalui KPL dan atau pendamping masyarakat yang diselenggarakan oleh daerah;
 - c. Menyusun program kerja pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif di tingkat sistem utama (primer dan sekunder);
 - d. Menjaga dan meningkatkan kondisi fisik dan tingkat kefungsian jaringan irigasi-pertanian;
 - e. Menyusun pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi-pertanian, serta rencana tahunan penyediaan air irigasi-pertanian;
 - f. Bahan dalam menetapkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;

- g. Dana Pengelolaan Irigasi-pertanian (DPI) yang diusulkan oleh kelembagaan P3A/GP3A/IP3A pada suatu daerah irigasi
 - h. Kebutuhan pelatihan untuk kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan baik aspek teknis, kelembagaan maupun usahatani dan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal;
 - i. Menyusunan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI/AKNOP) pada tingkat sistem utama (jaringan primer dan sekunder);
 - j. Peningkatan pelayanan kebutuhan air irigasi bagi kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan;
 - k. Pertimbangan dalam Kerjasama Pengelolaan Irigasi (KSP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan irigasi-pertanian;
 - l. pertimbangan izin alih fungsi lahan pertanian beririgasi; dan
 - m. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif dan pemberdayaan kelembagaan petani P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan.
4. Usulan tindak lanjut bagi pemangku kepentingan lainnya terkait dengan irigasi-pertanian sekurang-kurangnya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam:
- a. Memberikan fasilitasi bantuan sesuai kebutuhan kelembagaan petani daerah irigasi melalui P3A/GP3A/ IP3A maupun Poktan/Gapoktan.
 - b. Membangun hubungan kerjasama berdasarkan kesetaraan dan kemitraan baik dalam kegiatan pengelolaan irigasi-pertanian maupun pengembangan kelembagaan kelembagaan petani P3A/GP3A/IP3A maupun Poktan/Gapoktan pada daerah irigasi-pertanian.

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan dari Bab-bab tersebut dan penekanan pada kegiatan yang dapat segera dilaksanakan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Memuat data pendukung yang menjadi penjelasan dari bagian isi/substansi pelaporan PSETK di atas, pada intinya apa yang disampaikan dalam Laporan diperlukan kelengkapan data (terutama yang bersifat kualitatif) sehingga dalam Laporan PSETK diperlukan Lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan secara utuh Laporan PSETK pada Daerah Irigasi yang bersangkutan secara minimal disampaikan Lampiran hal-hal sebagai berikut :

Tabel 12 Lampiran Laporan PSETK

No Lamp	Judul Lampiran	Isi Lampiran	Keterangan
1	Formulir isian PSETK	Profil Umum Profil Sumber, Ketersediaan, dan Alokasi air irigasi Profil Teknik Profil Sosial Ekonomi (seluruh desa yang ada pada DI tersebut) Profil Kelembagaan (lampiran semua P3A yang ada)	Sesuai Form isian baku dalam Lampiran Panduan PSETK Harus terisi secara lengkap
2	Peta/sketsa/skema jaringan Irigasi DI	Peta/sketsa/skema pada Lampiran 2 dilengkapi dengan spot-spot temuan masalah di lapangan baik kelembagaan maupun teknis seperti Spot-spot kerusakan hasil penelusuran jaringan untuk memudahkan perencanaan program	Akan lebih baik jika peta yang memiliki skala ukur
3.	Peta/Sketsa/Skema Bangunan Irigasi	Gambar bangunan-bangunan irigasi yang ada di DI	Akan lebih baik jika peta yang memiliki skala ukur
4.	Peta/sketsa/skema beberapa Desa pada DI yang bersangkutan	Lokasi desa yang teraliri oleh jaringan irigasi yang di PSETK	Akan lebih baik jika peta yang memiliki skala ukur
5.	Pola dan Jadwal Tanam	Kondisi Usaha Tani Data luas areal dan Data panen dan nilai pendapatan	Ada pada Lampiran Panduan PSETK
6.	Daftar hadir Peserta pertemuan	Rapat koordinasi Pertemuan awal di tingkat DI Penjelasan Form PSETK Pembentukan TIM Pembahasan Analisis hasil PSETK Sosialisasi hasil PSETK	Disesuaikan dengan jenis kegiatannya sesuai dengan alur kegiatan pelaksanaan PSETK (Contoh ada pada Lampiran Panduan PSETK)
7.	Daftar Hadir Peserta Penelusuran Jaringan Irigasi	Berisi nama peserta, instansi, alamat dan tanda tangan	Contoh ada pada Lampiran Panduan PSETK
8.	Daftar Masalah, penanganan	Memuat tentang	Ada pada Lampiran

No Lamp	Judul Lampiran	Isi Lampiran	Keterangan
	masalah, rekap kebutuhan, dan Rancana Tindak Lanjut /Program Kerja.	permasalahan yang ada di tingkat DI yang ditelusuri beserta penanganan pemecahannya dilengkapi dengan rencana tindak	Panduan PSETK
9.	Screening/Pentapisan tentang Kondisi lingkungan dan Sosial DI	Memuat tentang hasil kajian cepat tentang dampak terhadap lingkungan	Format terdapat dalam lampiran
10.	Foto Dokumentasi Pelaksanaan PSETK	Dokumentasi foto terkait pelaksanaan alur kegiatan PSETK seperti rapat koordinasi, penelusuran jaringan dll	
11.	Struktur Organisasi P3A/GP3A di DI tersebut	Berupa diagram struktur organisasi masing-masing P3A/GP3A yang ada di Daerah Irigasi tersebut	
12.	Berita Acara Pembentukan P3A/GP3A	Pernyataan tentang tanggal, bulan dan tahun dibentuknya P3A/GP3A yang ditandatangani oleh pihak terkait	
13.	Berita Acara Pembahasan Hasil PSETK	Pernyataan tentang tanggal, bulan dan tahun dibahasnya hasil PSETK yang ditandatangani oleh pihak terkait yang terlibat	Contoh ada pada Lampiran Panduan PSETK
14.	Berita Acara Penyusunan PSETK	Pernyataan tentang tanggal, bulan dan tahun penyusunan PSETK (mulai dari pertemuan, penelusuran jaringan irigasi, FGD dan pembahasan hasil PSETK) yang ditandatangani oleh pihak terkait yang terlibat	Contoh ada pada Lampiran Panduan PSETK

Catatan :

Lampiran tidak terbatas pada apa yang telah dicantumkan tersebut di atas, untuk itu dapat ditambahkan beberapa dokumen pendukung untuk kelengkapan pelaporan PSETK dalam rangka mendukung kebutuhan kegiatan seperti revitalisasi/Pembentukan P3A/GP3A, SID-P, kebutuhan administrasi konstruksi dll.

**INSTRUMEN PENILAIAN PROFIL SOSIAL EKONOMI TEKNIS DAN KELEMBAGAAN (PSETK)
PROVINSI / KABUPATEN - PROGRAM IPDMIP**

Nama Kabupaten : _____
 Nama, Kode DI, dan Luas Areal (ha) : _____ DI, _____ Ha
 a. Kewenangan Kab./Kota
 b. Kew. Provinsi (dalam Kab/Kota)
 c. Kew. Pusat (dalam Kab/Kota)

No.	Variabel/Parameter/Indikator	Penilaian		Nilai Sub Total	
		Max	Nilai		
I. PEMBENTUKAN				Max	
1. Pembentukan Tim Penyusun PSETK				25,00	
	a. Rapat persiapan penyusunan pembentukan Tim	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	7,00		
	b. SK Tim ditetapkan Kepala Bappeda	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	10,00	10,00	
	c. Komposisi Anggota Tim	tidak lengkap <input type="text"/>	lengkap <input type="text"/>		
		0,00	8,00		8,00
II. LAPORAN				Max	
1. Penyusunan Laporan				60,00	
	a. Penyusunan Laporan	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	15,00		15,00
	2. Isi laporan				
	a. Profil kemampuan sosial	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	5,00		5,00
	b. Profil kemampuan sosial ekonomi	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	5,00		5,00
	c. Profil kondisi teknis	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	5,00		5,00
	d. Profil kondisi kelembagaan	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	5,00		5,00
	e. Identifikasi potensi sumberdaya	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	5,00		5,00
	f. Identifikasi kebutuhan penelitian	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	5,00		5,00
	g. Rekapitulasi masalah	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>	5,00	
		0,00	5,00	5,00	
III. PARTISIPATIF				Max	
1. Sosialisasi Pertemuan Persiapan				25,00	
	a. Notulen	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	5,00		5,00
	b. Daftar Hadir Rapat persiapan	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	5,00	5,00	
	2. Berita Acara Penelusuran Jaringan	tidak ada <input type="text"/>	ada <input type="text"/>		
		0,00	5,00		5,00
	3. Penasehati perempuan	tidak ada <input type="text"/>	1-29% <input type="text"/>		
		0,00	3,00		5,00
		Total Skor Maksimal		100,00	
		Hasil Skor Penilaian		0	
Kategori Hasil Penilaian: a. Skor 71 < N < 100				Baik	
b. Skor 61 < N < 70				Cukup	
c. Skor 1 < N < 60				Kurang	

NAMA RESPONDEN (Perwakilan Tim PSETK)

NAMA ENUMERATOR

(_____)

(_____)



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Taman Makam Pahlawan No 20, Kalibata Jakarta Selatan 12750**